

**ANALISIS FRAMING TERHADAP PEMBERITAAN
RANCANGAN UNDANG-UNDANG ANTI
PORNOGRAFI DAN PORNOAKSI (RUU APP)
DALAM SURAT KABAR SUARA MERDEKA
EDISI MARET-APRIL 2006**



SKRIPSI

Untuk memenuhi sebagian persyaratan
mencapai derajat Sarjana Sosial Islam (S.Sos.I)

Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI)

Muahzab
1102175

**FAKULTAS DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2008**

NOTA PEMBIMBING

Lamp : 5 (lima) eksemplar

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Dakwah
IAIN Walisongo Semarang
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa skripsi saudara:

Nama : **Muahzab**

NIM : 1102175

Fak./ Jurusan : DAKWAH/KPI

Judul Skripsi : **ANALISIS FRAMING TERHADAP
PEMBERITAAN RANCANGAN UNDANG-
UNDANG ANTI PORNOGRAFI DAN
PORNOAKSI DALAM SURAT KABAR SUARA
MERDEKA EDISI MARET-APRIL 2006**

Dengan ini telah kami setujui dan mohon agar segera diujikan.
Demikian, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 14 Juli 2008

Pembimbing

Bidang Substansi Materi

Bidang Metodologi & Tata Tulis

Drs. H. M. Nafis, MA
Tanggal: 14 Juli 2008

Drs. H. Najahan Musyafak, MA
Tanggal: 14 Juli 2008

SKRIPSI
ANALISIS FRAMING TERHADAP PEMBERITAAN RANCANGAN
UNDANG-UNDANG ANTI PORNOGRAFI DAN PORNOAKSI (RUU APP)
DALAM SURAT KABAR SUARA MERDEKA
EDISI MARET-APRIL 2006

Disusun oleh

Muahzab
1102175

telah dipertahankan di depan penguji
pada tanggal 23 Juli 2008
dan dinyatakan telah lulus memenuhi sarat

Susunan Dewan Penguji

Ketua Dewan Penguji/
Dekan / Pembantu Dekan

Hj. Yuyun Affandi, Lc. M.A
NIP.150 254 345

Sekretaris Dewan Penguji/
Pembimbing

Drs. H. M. Nafis, M.A
NIP. 150 232 928

Anggota Penguji
Penguji I

Dr. Ilyas Supena, M.Ag
NIP. 150 318 454

Penguji II

Ahmad Faqih, S.Ag., M.Si
NIP. 150 279 727

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil kerja saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi di lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 14 Juli 2006

Penulis

Muahzab

NIM. 1102175

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ

فَتُصِيبُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ. (الحجرات: 6)

"Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu." (QS. al-Hujurat: 6)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

Kedua orang tuaku, sebagai tanda terima kasihku atas segala do'a dan kasih sayang. Tak mungkin aku bisa membalas kebaikan budimu.

Kakak dan adikku yang selalu memotivasi, tanpa kalian aku tak ada artinya.

Keponakanku, senyum dan keceriaanmu telah memberikan arti tersendiri kepadaku...

ABSTRAKSI

Nama : Muahzab, Judul: Analisis Framing Terhadap Pemberitaan Rancangan Undang-Undang Anti Pornografi dan Pornoaksi Dalam Surat Kabar Suara Merdeka Edisi Maret-April 2006.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana konstruksi berita tentang Rancangan Undang-Undang Anti Pornografi dan Pornoaksi (RUU APP) dalam surat kabar Suara Merdeka edisi Maret-April 2006

Dalam penelitian ini penulis menganalisis menggunakan analisis framing model Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosichi, dengan unsur-unsur sebagai berikut: struktur sintaksis, struktur skrip, struktur tematik, struktur retorik. Analisis framing secara umum membahas mengenai bagaimana media membentuk konstruksi atas realitas, menyajikannya dan menampilkan kepada khalayak.

Hasil yang didapat dari penelitian adalah:

Dalam mengkonstruksi wacana berita tentang RUU APP, Suara Merdeka menerapkan strategi yang cukup menonjol pemfokusan adalah terhadap fakta, pemilihan dalam salah satu bagian pernyataan serta label. Contoh sederhana dapat ditemukan sebuah berita yang menyebutkan "Inneke: Banyak Artis Dukung RUU APP" sebagai bentuk dukungan kepada RUU APP. Strategi yang dipakai Suara Merdeka seperti di atas antara berita satu dan lainnya saling mendukung. Semua itu digunakan untuk mendukung gagasannya.

Disisi lain bisa dimaknai Suara Merdeka tidak mendukung pihak kontra RUU APP, itu dibuktikan judul dan lead yang ditulis seperti yang di atas. Strategi lain yang tampak ditekankan adalah penempatan elemen grafis, yaitu foto-foto tentang proses berita RUU APP, untuk mendukung gagasannya. Hal ini ditandai dalam setiap pemberitaannya Suara Merdeka selalu mengimbangi berita dengan data-data yang lengkap.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada Rasulullah dan para pengikutnya, karena dengan semua itu penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.

Tidak ada kata yang pantas penulis ucapkan kepada pihak-pihak yang membantu proses pembuatan skripsi ini, kecuali terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Drs. H. M. Zain Yusuf, MM, selaku Dekan Fakultas Dakwah IAIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Drs. H. M. Nafis, MA dan Drs. H. Najahan Musyafak, M.A, selaku pembimbing skripsi yang dengan tulus, ikhlas dan tak henti-hentinya memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis.
3. Bapak Drs. Komarudin, M.Ag. selaku dosen wali, terimakasih segalanya.
4. Bapak Ibu dosen yang telah memberikan transformasi ilmu kepada penulis
5. Bapak dan Ibuku tercinta, karya ini sebagai tanda terima kasihku atas segala do'a dan kasih sayang.
6. Kawan-kawan di LPM MISSI, DSC, Wadas dan teman-teman KPI 2002.

Semoga amal baik yang telah diberikan dapat menjadi amal jariyah sekaligus mendapat balasan dari Allah SWT.

Penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih belum sempurna, baik dalam penyusunan maupun bahasanya. Karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari pembaca. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua.

Semarang, 14 Juli 2008

Penulis

Muahzab
NIM. 1102175

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
HALAMAN ABSTRAKSI	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	ix

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah	5
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
1.4. Tinjauan Pustaka	7
1.5. Metode Penelitian	8
1.6. Sistematika Penulisan Skripsi	14

BAB II. DAKWAH, MEDIA MASSA DAN ETIKA PEMBERITAAN

2.1. Tinjauan Umum Tentang Dakwah	15
2.1.1. Pengertian Dakwah	15
2.1.2. Dasar Hukum Dakwah	17
2.1.3. Unsur-Unsur Dakwah	19
2.1.4. Dakwah Melalui Media Massa	22
2.2. Media Massa	24
2.2.1. Pengertian Media Massa	24
2.2.2. Karakteristik Media Massa	26
2.2.3. Fungsi dan Peran Media Massa	28
2.2.4. Ideologi Media Massa	31

2.3. Etika Pemberitaan	34
2.3.1. Pengertian Berita	34
2.3.2. Jenis-Jenis Berita	38
2.3.3. Kode Etik Pemberitaan	39
 BAB III. PEMBERITAAN SUARA MERDEKA TENTANG RANCANGAN UNDANG-UNDANG ANTI PORNOGRAFI DAN PORNOAKASI (RUU APP)	
3.1. Profil Suara Merdeka	49
3.1.1. Sejarah Singkat Suara Merdeka	49
3.1.2. Motto Suara Merdeka	52
3.1.3. Struktur Organisasi Suara Merdeka	53
3.2. Pemberitaan Suara Merdeka Tentang Pro Kontra RUU APP	45
 BAB IV. ANALISIS FRAMING TERHADAP PEMBERITAAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG ANTI PORNOGRAFI DAN PORNOAKSI (RUU APP)	
4.1. Analisis Framing Terhadap Pemberitaan RUUAPP	67
4.2. Pemberitaan Suara Merdeka Tentang RUU APP dilihat dari Perspektif Dakwah	108
 BAB V. PENUTUP	
5.1. Kesimpulan	114
5.2. Saran-Saran	115
5.3. Penutup	116

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Merebaknya media massa, khususnya media cetak seperti surat kabar, tabloid, dan majalah, merupakan salah satu hasil dari era informasi dan keterbukaan. Berbagai informasi berdatangan tiap hari dan tiap saat. Berbagai pandangan pun berkembang seakan tiada mengenal henti. Semua pesan dari media massa dikonsumsi oleh masyarakat serta menjadi bahan informasi dan referensi pengetahuan mereka (Kusnawan, 2004: 23).

Tugas media menurut Alex Sobur (2006: viii) adalah menyampaikan kebenaran. Namun tugas menyampaikan kebenaran itu tidaklah sederhana. Ada berbagai kepentingan yang “berbicara” yang pada gilirannya memberi bentuk pada kebenaran yang disampaikan. Selalu saja ada ketegangan di antara pihak yang memiliki kepentingan dan masyarakat umum sebagai konsumen berita. Hal ini dikarenakan banyaknya media yang beredar dengan *setting* pemberitaan yang berbeda serta keperluan dan kepentingan yang berbeda juga.

Dakwah dengan menggunakan media massa untuk menjalankan misi suci merupakan langkah strategis. Fakta yang dikemas dalam bahasa (berita) telah disisipi berbagai kepentingan yang bukan merupakan pengetahuan yang

sesungguhnya, tetapi pengetahuan dari berbagai pihak yang dilebur ke dalam bentuk berita (Pimay, 2005: 180).

Gambaran tentang realitas yang “dibentuk” oleh isi media massa inilah yang nantinya mendasari respon dan sikap khalayak terhadap berbagai obyek sosial. Informasi yang salah dari media massa akan memunculkan gambaran yang salah pula pada khalayak, sehingga akan memunculkan respon dan sikap yang salah juga terhadap obyek sosial itu. Karenanya media massa dituntut menyampaikan informasi secara akurat dan berkualitas (Muis, 2001: 11).

Dalam menyikapi banyaknya media yang beredar dengan berita yang hampir sama dan banyak kecenderungan berbeda, maka kekritisian masyarakat dalam menikmati sebuah media sangat diperlukan. Hal ini diperlukan guna menyaring kebenaran pemberitaan dalam sebuah media.

Ketika media massa menggunakan pornomedia sebagai objek pemberitaan maupun proses pemberitaan, maka informasi dan pemberitaan porno itu akan sangat cepat dan meluas terkonstruksi sebagai pengetahuan di masyarakat. Proses kecepatan ini terjadi melalui tiga proses, yaitu eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi (Bungin, 2005: 126).

Pornografi melalui media erat kaitannya dengan proyek perzinahan yang berskala lebih luas dari lokalisasi. Setelah mayoritas publik menerima perzinahan dan pornografi sebagai norma sosial yang biasa akhirnya hinalah seluruh negeri tersebut, bahkan secara sukarela melegalkan pekerjaan zina sebagai profesi, demokrasi dan hak asasi manusia pekerja (Zuhdi, 2004: 151).

Benarlah apa yang dinyatakan Allah dalam surat an-Nur ayat 30:



Artinya: *Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih Suci bagi mereka, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat".* (Depag, 1993: 854)

Islam membuat koridor kepada manusia dalam menyalurkan kecintaan kepada lawan jenis melalui pernikahan yang sah menurut syariat Islam. Islam juga sangat peduli terhadap martabat dan keselamatan kaum wanita antara lain dengan mewajibkan menutup aurat.

Sungguh naif dan egois, dalih dan logika HAM dipakai untuk melegalkan hal-hal yang nyata bertentangan dengan agama, etika dan moral. Kebebasan untuk berekspresi, berkreasi dalam bidang seni bukanlah kebebasan tanpa batas. Tetapi dibatasi oleh nilai-nilai dan norma yang bukan saja diakui tapi juga diyakini kemutlakannya (Zuhdi, 2004: 142).

Di antara kelompok yang menentang RUU APP adalah dari kalangan seniman dan seniwati. Bukan semata-mata beralasan karena RUU itu dianggap bisa menghambat kreativitas seni, tetapi juga karena mereka merasa khawatir jika sumber mata pencahariannya ditutup gara-gara dianggap bertentangan dengan undang-undang.

Kelompok yang setuju menganggap RUU APP sebagai “jalan masuk” ke arah penerapan syariat Islam dalam kehidupan masyarakat. Argumen

kelompok yang pro dilandasi oleh logika, bahwa bangsa atau negara ini tengah berada dalam ancaman budaya globalisasi yang merusak moral generasi muda. Karena itu harus dihadapi dengan gerakan dan peraturan politik yang membatasi budaya globalisasi tersebut, yang diidentikkan dengan seks bebas, pergaulan bebas, dan sebagainya. Beragamnya interpretasi tersebut maka menjadi tidak bijak ketika ada seseorang atau kelompok tertentu yang “memaksakan” interpretasinya terhadap yang lain. “Pemaksaan” tersebut berbuntut terhadap tindakan brutal, anarkis, pencekalan dan main hakim sendiri (Justisia, 2006: 5).

Secara garis besar ada dua persoalan mengenai berita tersebut. Pertama, terkait dengan penolakan RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi, karena tidak bisa menjaga persatuan dan kesatuan Bangsa. Beberapa daerah di Indonesia RUU ini tidak sesuai dengan adat suatu daerah. Hal ini juga bisa terpengaruh dengan Pakaian Nasional. Setiap daerah mempunyai pakaian adat masing-masing, dan RUU ini tidak mengakui keragaman di Indonesia. Kedua, mendukung RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi, tidak etis jika dibenarkan menyiarkan pornografi dengan dalih kebebasan pers dan seni, sekarang penerbitan pornografi sepertinya tidak dapat dibatasi.

Penulis ingin mengetahui bagaimana surat kabar Suara Merdeka memberitakan RUU APP. Penulis akan menganalisis berita yang ditampilkan surat Kabar Suara Merdeka mengenai pemberitaan Rancangan Undang-Undang Anti Pornografi dan Pornoaksi (RUU APP) dalam surat kabar Suara Merdeka edisi Maret-April 2006.

Alasan penulis memilih framing sebagai analisis teks media, dalam analisis framing yang menjadi pusat perhatian adalah pembentukan pesan dari teks. Bagaimana wartawan mengkonstruksi peristiwa dan menyajikannya kepada khalayak pembaca. Jadi dengan framing kita dapat mengetahui idiologi suatu media. Penelitian ini berusaha mengkaji seputar pemberitaan RUU APP di Harian Suara Merdeka. Penulis berusaha menemukan kecenderungan wartawan Suara Merdeka dalam mengkonstruksi pemberitaan tersebut.

Adapun alasan penulis meneliti dari bulan Maret sampai dengan April 2006, adalah pada bulan tersebut Pansus RUU APP sedang membahas tentang isu tersebut, yang berakibat maraknya pemberitaan di media massa. Kemudian alasan penulis meneliti Suara Merdeka, karena Suara Merdeka mempunyai kedekatan dengan masyarakat Jawa Tengah. Untuk itu layak kiranya penulis mengambil penelitian dengan judul “ANALISIS FRAMING TERHADAP PEMBERITAAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG ANTI PORNOGRAFI DAN PORNOAKSI (RUU APP) DALAM SURAT KABAR SUARA MERDEKA EDISI MARET-APRIL 2006”.

1.2.Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana konstruksi berita tentang Rancangan Undang-Undang Anti Pornografi dan Pornoaksi (RUU APP) dalam surat kabar Suara Merdeka edisi Maret-April 2006?

1.3. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui konstruksi dan makna yang tersembunyi dalam pemberitaan Rancangan Undang-Undang Anti Pornografi dan Pornoaksi (RUU APP) dalam surat kabar Suara Merdeka.

1.3.2. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan mampu menambah khazanah pengetahuan yang berkaitan dengan dakwah di media cetak
- b. Dari hasil penelitian ini agar berguna bagi peningkatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat pula bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

2. Secara praktis

Selain sebagai syarat memperoleh gelar sarjana, juga bisa memberikan sumbangan pada Fakultas Dakwah tentang kondisi media massa di Jawa Tengah, sehingga selanjutnya dijadikan pertimbangan dalam berdakwah di media massa.

1.4. Tinjauan Pustaka

Dari berbagai penelitian yang dilakukan mahasiswa khususnya Fakultas Dakwah IAIN Walisongo Semarang, ada beberapa judul penelitian tentang dakwah di media massa, diantaranya adalah:

Pertama, skripsi yang berjudul “*Pemberitaan Media Massa tentang Invasi Amerika Serikat ke Irak (Analisis Framing Surat Kabar Republika tanggal 20 Maret – 19 April 2003)*”. Yang ditulis oleh Sri Susmiyati (2004), tahun 2004, yang menjadi titik fokus dalam penelitiannya adalah bagaimana surat kabar Republika mengkonstruksi pemberitaannya tentang invasi Amerika Serikat ke Iraq serta cara pandang media massa dalam memberitakan invasi AS ke Iraq. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa surat kabar Republika cenderung mengemas beritanya dalam *frame unfavourable* terhadap AS dan sekutunya. Dalam pandangan Republika, tindakan AS menyerang irak diberi penonjolan yang lebih tinggi bahwa penyerangan itu tidak beralasan dan sebuah bentuk penyimpangan (Susmiyati, 2004: 16).

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Nur Zaidah (2006), yang berjudul “*Analisis Framing Terhadap Pemberitaan Muktamar Nahdhatul Ulama Ke-31 Di Surat Kabar Suara Merdeka Edisi Nopember-Desember 2004*”. Di sini penulis dalam mengkaji isi teks sebuah berita di surat kabar menggunakan analisis framing yang dikemukakan oleh Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki (Zaidah, 2006: 16).

Ketiga, skripsi saudara Achmad Saifudin yang berjudul “*Pemuatan Artikel Agama Islam Sebagai Upaya Peningkatan Dakwah Melalui Surat*

Kabar Suara Merdeka (November 2001 - April 2002)”. Dalam penelitian ini penulis menyimpulkan, artikel keislaman yang dimuat di dalam surat kabar Suara Merdeka terdiri dari berbagai jenis (macam) topik pembahasan, yaitu: *Pertama*, mengenai aqidah Islam yang membahas mengenai keyakinan dan keimanan seseorang terhadap Tuhannya. *Kedua*, ibadah yang membahas tentang peribadatan (ritual). *Ketiga*, mu'amalah yang membahas tentang interaksi sosial, meskipun di dalamnya terdapat unsur ibadah secara umum.

Di sini penulis meneliti tentang kecenderungan Suara Merdeka dalam memberitakan Rancangan Undang-Undang Anti Pornografi dan Pornoaksi dilihat dari perspektif dakwah.

1.5. Metodologi Penelitian

1.5.1. Jenis Penelitian /Pendekatan/Spesifikasi Penelitian

Dalam penelitian skripsi ini, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif. Metode ini ditujukan untuk mengembangkan konsep dan pemahaman serta kepekaan peneliti, bukan ditujukan untuk membentuk fakta, melakukan prediksi dan tidak pula menunjukkan hubungan dua variabel (Muhtadi, 2003: 97).

Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah framing. Framing merupakan metode untuk mengetahui bagaimana perspektif atau cara pandang yang digunakan oleh wartawan ketika menyeleksi dan menulis berita (Eriyanto, 2005: 68). Pembingkaiannya itu tentu saja melalui proses

konstruksi, di sini realitas dimaknai dan dikonstruksi dengan makna tertentu (Eriyanto, 2005: 3).

Analisis framing adalah salah satu metode analisis teks berada dalam kategori penelitian konstruksionis. Paradigma ini memandang realitas kehidupan sosial bukanlah realitas yang natural, tetapi hasil dari konstruksi. Oleh karena itu konsentrasi analisis pada paradigma konstruksionis adalah menemukan bagaimana peristiwa atau realitas tersebut dikonstruksi, dengan cara apa konstruksi itu dibentuk (Eriyanto, 2005: 37).

1.5.2. Sumber dan Jenis Data

1.5.2.1. Data Primer

Data primer yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya (Suryabrata: 2003, 39). Data primer dalam penelitian ini adalah teks berita di surat kabar Suara Merdeka yang menampilkan pemberitaan Rancangan Undang-Undang Anti Pornografi dan Pornoaksi (RUU APP). Data tersebut penulis ambil dari surat kabar Suara Merdeka edisi Maret-April 2006.

1.5.2.2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitiannya (Syarifudin, 1998: 91). Dalam penelitian ini penulis juga akan menggunakan data-data yang berkaitan dengan

permasalahan yang penulis bahas. Seperti data dari buku-buku, internet dan data-data lainnya yang bersifat menunjang data yang peneliti perlukan.

1.5.3. Definisi Konseptual

Berita adalah sebuah aspek komunikasi dan memiliki karakteristik-karakteristik yang lazim dari proses itu (Hikmat, 2005: V). Sedangkan pada definisi yang lain berita merupakan sebuah laporan yang bermakna tentang peristiwa, laporan yang menyangkut pilihan beberapa orang (terutama wartawan) yang melakukan pilihan yang memberi nama, menginterpretasikan, dan memberi bentuk kepada kejadian yang diketahui (Nimmo, 1993: 220), sehingga pemberitaan dapat dimaknai proses penyampaian aspek komunikasi yang memiliki karakteristik serta dibentuk dan diinterpretasikan oleh wartawan.

Definisi pro adalah setuju/mendukung, sedangkan kontra adalah lawan, melawan, menentang, tidak menyetujui (Poerwadarminta, 1996: 521, 769).

Definisi pornografi adalah segala gambar dan visualisasi yang diarahkan untuk merangsang nafsu seksual, sedangkan pornoaksi adalah gerakan-gerakan melalui tarian dan penampilan kesenian lainnya yang merangsang munculnya seksual (Zuhdi, 2004: 141).

1.5.4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode dokumentasi dalam mengumpulkan data yang hendak diteliti. Metode dokumentasi

yakni mencari data mengenai hal-hal berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya (Arikunto, 2002: 135). Metode ini relatif lebih memudahkan peneliti karena sumber datanya tetap dan tidak berubah.

Penulis mengumpulkan data yang berkaitan dengan RUU APP baik tertulis maupun dari internet. Data yang utama adalah data dari surat kabar Suara Merdeka edisi Maret-April 2006, karena edisi inilah Suara Merdeka memberitakan tentang RUU APP. Dari data yang terkumpul hanya tulisan yang berjenis berita nasional saja yang akan dianalisis.

Secara keseluruhan pemberitaan mengenai RUU APP dalam Suara Merdeka edisi Maret-April 2006 sebanyak 24 berita nasional, 8 berita daerah, 4 wacana, dan 1 tajuk rencana.

1.5.5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan untuk orang lain (Muhajir, 1991: 50).

Dalam penelitian ini penulis menganalisis menggunakan analisis framing model Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosichi. Menurut Eriyanto ada empat model framing yang dikembangkan oleh para ahli. Model-model tersebut dikembangkan oleh Edelman, Robbet N. Entman, Gamson, serta Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosichi. Meskipun ada

banyak istilah dan definisi, berbagai model tersebut mempunyai kesamaan. Analisis framing secara umum membahas mengenai bagaimana media membentuk konstruksi atas realitas, menyajikannya dan menampilkan kepada khalayak.

Zongdang Pan dan Kosicki mendefinisikan framing sebagai proses membuat suatu pesan lebih menonjol, menempatkan informasi lebih dari pada yang lain sehingga khalayak lebih tertuju pada pesan tersebut. Ada dua konsepsi dari framing yang saling berkaitan. Pertama, dalam konsepsi psikologi. Konsepsi ini lebih memfokuskan pada bagaimana seseorang memproses informasi pada dirinya. Framing berkaitan dengan struktur dan proses kognitif bagaimana seseorang mengolah sejumlah informasi dan di tunjukkan dalam skema tertentu (Eriyanto, 2002: 252).

Pertama, dalam konsepsi psikologi. Konsepsi ini lebih memfokuskan pada bagaimana seseorang memproses informasi pada dirinya. Framing berkaitan dengan struktur dan proses kognitif bagaimana seseorang mengolah sejumlah informasi dan ditunjukkan dalam skema tertentu (Eriyanto, 2005: 252).

Kedua, konsepsi sosiologis. Konsepsi ini lebih melihat bagaimana konstruksi sosial atas realitas. Frame ini dipahami sebagai proses bagaimana seseorang mengklasifikasikan, mengorganisasikan dan menafsirkan pengalaman sosialnya untuk mengerti dirinya, dan realitas di luar dirinya. Frame di sini berfungsi membuat suatu realitas

menjadi teridentifikasi, dipahami dan dapat dimengerti karena sudah dilabeli dengan label tertentu (Eriyanto, 2005: 253).

Dalam mengkaji isi teks sebuah berita di surat kabar menggunakan analisis framing yang dikemukakan oleh Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosichi. Pendekatan ini mereka membagi ke dalam empat struktur besar yaitu:

- a. Struktur Sintaksis berhubungan dengan bagaimana wartawan menyusun peristiwa. struktur ini dapat diamati dari bagan berita yaitu lead, latar, headline, informasi, kutipan, sumber pernyataan dan penutup.
- b. Struktur Skrip, berhubungan bagaimana wartawan mengisahkan sebuah fakta. Struktur ini dapat diamati dengan adanya unsur 5W+1H.
- c. Struktur Tematik, struktur ini berhubungan dengan bagaimana cara wartawan menulis sebuah fakta. Struktur ini dapat diamati melalui paragraf, proposisi, kalimat, hubungan antar kalimat.
- d. Struktur Retoris, dalam struktur ini wartawan menekankan sebuah fakta. Struktur ini dapat diamati melalui kata, idiom, gambar, grafik (Sobur, 2006: 176).

Untuk membedakan berita yang pro dan kontra penulis menggunakan pernyataan, kode positif atau favorable (pro RUU APP), yaitu pernyataan yang secara positif menunjuk pada kekuatan mendukung atau kegiatan (aktif, rajin).

Sedangkan kontra pertanyaan diberi kode negatif atau unfavorable (kontra RUU APP), yaitu pernyataan yang secara negatif menunjuk pada kekuatan menolak RUU APP (Flournoy, 1989: 162).

1.7.Sistematika Penulisan

Dalam Skripsi ini penulis membagi menjadi lima bab. Hal ini dilakukan karena penulisan metodologi penelitian masuk ke dalam bab pertama. Sistematika disini dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran yang jelas dalam pembahasan skripsi ini. Sistematikanya adalah:

- BAB I Penulis akan menguraikan mengenai pendahuluan, latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik dan metodologi penelitian meliputi: jenis penelitian, sumber dan jenis data serta teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan sistematika penulisan.
- BAB II Dalam bab ini diuraikan secara sistematis mengenai tinjauan umum tentang dakwah yang meliputi: pengertian dakwah, dasar hukum dakwah dan unsur-unsur dakwah. Dan dakwah melalui media massa. Media massa meliputi pengertian media massa, karakteristik media massa, fungsi dan peran media massa. Serta Kode Etik Jurnalistik dalam Pemberitaan, Media dan Berita Dilihat dari Paradigma Konstruksionis
- BAB III Berisi uraian tentang profil Suara Merdeka meliputi sejarah singkat, struktur organisasi Suara Merdeka, pemberitaan Rancangan Undang-Undang Anti Pornografi dan Pornoaksi.
- Bab IV Merupakan analisis framing tentang pemberitaan RUU APP, edisi Maret-April 2006. Dalam bab ini penulis akan menggunakan model analisis framing Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki untuk menganalisis teks-teks berita tersebut.
- Bab V Yang terakhir adalah berisi kesimpulan dan saran dari penulis.

BAB II

DAKWAH MEDIA MASSA DAN ETIKA PEMBERITAAN

2.1. Tinjauan Umum Tentang Dakwah

2.1.1. Pengertian Dakwah

Kata dakwah secara etimologi berasal dari Bahasa Arab yang berarti “panggilan, ajakan, atau seruan”. Dalam Ilmu Tata Bahasa Arab kata dakwah berbentuk *isim masdar* sedangkan bentuk *fi’il*-nya adalah “*da-a, yad’u*” yang berarti “memanggil, mengajak atau menyeru” (Syukir, 1983: 17).

Secara terminologi, meski tertulis dalam Al-Quran, pengertian dakwah tidak ditunjukkan secara eksplisit oleh Nabi Muhammad. Oleh karena itu, umat Islam memiliki kebebasan merujuk perilaku tertentu sebagai kegiatan dakwah. Dalam kaitan dengan itu, maka muncullah beberapa definisi dakwah (Sulton, 2003: 8) Di antaranya sebagai berikut:

1. Menurut Asep Muhyidin dan Agus Ahmad Safei dakwah adalah segala rekayasa dan reka daya untuk mengubah segala bentuk penyembahan kepada selain Allah menuju keyakinan tauhid, mengubah semua jenis kehidupan yang timpang ke arah kehidupan yang lempang, yang penuh dengan ketenangan batin dan kesejahteraan lahir berdasarkan nilai-nilai Islam.

2. Asep S. Muhtadi dan Sri Handajani menuturkan bahwa dakwah adalah upaya konstruktif seseorang untuk melakukan perubahan suatu situasi yang negatif menjadi situasi yang positif.
3. Sedangkan Amrullah Achmad mengungkapkan bahwa dakwah adalah mengadakan dan memberikan arah perubahan. Mengubah struktur masyarakat dan budaya dari kedhaliman ke arah keadilan, kebodohan ke arah kemajuan atau kecerdasan, kemiskinan ke arah kemakmuran.
4. Terakhir adalah pendapat Asmuni Sukir, dia mengungkapkan bahwa dakwah adalah suatu usaha mempertahankan, melestarikan dan menyempurnakan umat manusia agar mereka tetap beriman kepada Allah, dengan menjalankan syariat-Nya sehingga mereka menjadi manusia yang hidup bahagia di dunia maupun akhirat.

Dari beberapa pendapat di atas dapat penulis simpulkan bahwa dakwah adalah mengajak manusia kepada yang ma'ruf dan mencegah yang munkar guna mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.

Tema dakwah juga dirujuk pada ayat-ayat Al-Quran yang di dalamnya menggunakan kata dakwah antara lain:

1. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 104.



Artinya: *“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang*

ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, merekalah orang-orang yang beruntung” (Depag RI, 1993: 93).

2. Al-Quran Surat Yunus ayat 25.

وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

Artinya: “Allah menyeru (manusia) ke Darussalam (surga), dan menunjuki orang yang dikehendakinya kepada jalan yang lurus (Islam)” (Depag RI, 1993: 310).

Sesungguhnya dakwah merupakan urusan besar, karena ia selalu mengawasi manusia, hidup dan matinya, bahagia dan celaka, serta pahala dan siksaanya. Yang menjadi masalah apakah risalah ini telah disampaikan kepada manusia untuk kemudian diterima dan diikuti, sehingga mereka berbahagia di dunia dan di akhirat, atau risalah itu disampaikan sehingga menjadi alasan bagi manusia di hadapan Allah dan menjadi penyebab kecelakannya di dunia (Aziz, 2000: 28).

2.1.2. Dasar Hukum Dakwah

Pijakan dasar pelaksanaan dakwah adalah Al-Quran dan Hadits. Di dalam dua landasan normatif tersebut terdapat dalil naqli yang ditafsirkan sebagai bentuk perintah untuk berdakwah. Di dalamnya juga memuat tata cara dan pelaksanaan kegiatan dakwah.

Berdakwah dengan segala bentuknya adalah wajib hukumnya bagi setiap muslim. Hal ini menunjukkan bahwa syariat atau hukum Islam tidak mewajibkan bagi umatnya untuk selalu mendapatkan hasil

yang maksimalnya, akan tetapi usahanyalah yang diwajibkan semaksimal sesuai dengan kemampuannya (Syukir, 1983: 27)

Dasar hukum pelaksanaan dakwah tersebut antara lain:

1. Perintah dakwah yang ditujukan kepada para utusan Allah tercantum pada Al-Quran Surat Al Maidah ayat 67.

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ
وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ

Artinya: *“Hai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Dan jika tidak kamu kerjakan (apa yang diperintahkan itu, berarti) kamu tidak menyampaikan amanat-Nya. Allah memelihara kamu dari (gangguan) manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir”* (Depag RI, 1993: 172).

2. Perintah dakwah yang ditunjukkan kepada umat Islam secara umum tercantum dalam Al-Quran Surat Nahl ayat 125.

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِهُمْ بِأَلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ
رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

Artinya: *“Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan berbantahlah kepada mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk”* (Depag RI, 1993: 421).

3. Perintah dakwah yang ditunjukkan kepada muslim yang sudah berupa panduan praktis tercantum dalam hadits:

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِيعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ

يَسْتَطِيعَ فَبِقَلْبِهِ وَ ذَلِكَ أَوْعَفُ الْإِيمَانِ (رواه مسلم)

Artinya: “Barangsiapa di antara kamu melihat kemungkaran, maka hendaklah ia merubah dengan tangannya, apabila tidak mampu (mencegah dengan tangan) maka hendaklah ia merubah dengan lisannya, dan apabila (dengan lisan) tidak mampu maka hendaklah ia merubah dengan hatinya, dan itu adalah selemah-lemah iman”.(Syukir, 1983 : 24).

2.1.3. Unsur-Unsur Dakwah

Yang dimaksud dengan unsur-unsur dakwah adalah komponen-komponen yang selalu ada dalam setiap kegiatan dakwah, yang tiap-tiap unsur saling mempengaruhi antar satu dengan yang lain. Unsur-unsur tersebut adalah :

1. Dai (subyek dakwah)

Yang dimaksud dai adalah orang yang melaksanakan dakwah baik lisan maupun tulisan ataupun perbuatan dan baik secara individu, kelompok atau berbentuk organisasi atau lembaga (Aziz, 2004: 76). Oleh karena itu terdapat syarat-syarat psikologis yang sangat kompleks bagi pelaksana yang sekaligus menjadi penentu dan pengendali sasaran dakwah. Salah satu syarat yang paling penting bagi seorang dai adalah masalah moral atau akhlak, budi pekerti (Aziz, 2004: 77).

2. Mad'u (obyek dakwah)

Unsur dakwah yang kedua adalah mad'u yaitu manusia yang menjadi sasaran dakwah atau manusia penerima dakwah, baik secara individu maupun sebagai kelompok, baik manusia yang beragama Islam maupun tidak atau dengan kata lain manusia secara keseluruhan.

Ada beberapa bentuk sasaran dakwah ditinjau dari segi psikologisnya, yaitu :

- a. Sasaran dakwah yang menyangkut kelompok masyarakat di lihat dari segi sosiologis berupa masyarakat terasing, pedesaan, perkotaan, kota kecil, serta masyarakat di daerah marjinal dari kota besar.
- b. Sasaran dakwah di lihat dari struktur kelembagaan, ada golongan priyayi abangan dan santri, terutama pada masyarakat jawa.
- c. Sasaran dakwah di lihat dari tingkatan usia, ada golongan anak-anak, remaja dan golongan orang tua.
- d. Sasaran dakwah di lihat dari segi profesi, ada golongan petani, pedagang, seniman, buruh, pegawai negeri.
- e. Sasaran dakwah di lihat dari segi tingkatan sosial ekonomis, ada golongan kaya, menengah dan miskin.
- f. Sasaran dakwah di lihat dari segi jenis kelamin, ada golongan pria dan wanita.

- g. Sasaran dakwah di lihat dari segi khusus ada masyarakat tunasusila, tunawisma, tunakarya, narapidana dan sebagainya (Aziz, 2004: 91).

3. Materi Dakwah

Unsur lain selalu ada dalam proses dakwah adalah materi dakwah: materi dakwah adalah masalah isi pesan atau materi yang disampaikan dai pada mad'u. materi-materi yang disampaikan dalam dakwah tentu saja tidak lepas dari dua unsur utama ajaran Islam, al-Qur'an dan sunnah Rasul SAW atau hadits Nabi. Tekanan utama materi dakwah tidak lepas dari aqidah, syari'ah dan akhlak. Dari bidang akidah meliputi keimanan atau kepercayaan kepada Allah, tauhid. Dari bidang syari'ah meliputi ibadah, muamalah, hukum perdata, hukum pidana. Dan dari bidang akhlak meliputi akhlak terhadap khalik, akhlak terhadap makhluk (Aziz, 2004: 94-95).

4. Metode Dakwah

Metode dakwah adalah jalan atau cara yang dipakai juru dakwah untuk menyampaikan ajaran materi dakwah (Islam). Dalam menyampaikan suatu pesan dakwah, metode sangatlah penting peranannya, suatu pesan walaupun baik, tetapi disampaikan lewat metode yang tidak benar, pesan bisa saja ditolak oleh si penerima pesan.

Pedoman dasar atau prinsip penggunaan metode dakwah Islam sudah termaktuf dalam al-Qur'an dan hadits Rasulullah.

Metode dakwah ada tiga, yaitu: *bil hikmah, mau'izatul hasanah dan mujadalah billati hiya ahsan* (Aziz, 2004: 123)

5. Media Dakwah

Media dakwah yaitu alat yang dipergunakan untuk menyampaikan materi dakwah kepada mad'u. Di era sekarang dakwah akan lebih efektif jika menggunakan media yang berkembang selama ini, khususnya dalam bidang komunikasi. Dakwah seperti ini bisa melalui televisi, radio, surat kabar dan berbagai macam media yang lain. Kelebihan dari pemakaian media ini adalah mudahnya menjangkau khalayak di berbagai tempat, sehingga lebih efektif. Para mubaligh, aktivis dan umat Islam pada umumnya selain tetap harus melakukan dakwah bil lisan (ceramah, tabligh dan khotbah) dapat pula harus mampu memanfaatkan media massa untuk melakukan dakwah bil qalam (dalam melalui pena/tulisan) di media cetak, melalui rubrik kolom, opini yang umumnya terdapat di surat kabar harian, mingguan, tabloid, majalah-majalah atau buletin internal masjid (Romly, 1999: 93).

Pada dasarnya dakwah tidak hanya lewat lisan dan tulisan tetapi ada juga yang lewat lukisan, gambar, audio visual yaitu dakwah melalui indra pendengaran atau penglihatan dan keduanya, televisi, film, slide, OHP, internet dan sebagainya (Aziz, 2004: 120).

2.1.4. Dakwah Melalui Media Massa

Lajunya perkembangan zaman memicu tingkat kemajuan ilmu dan teknologi, tidak terkecuali teknologi komunikasi yang merupakan suatu sarana menghubungkan suatu masyarakat dengan masyarakat di

dunia lain. Teknologi komunikasi ikut mempengaruhi seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk di dalamnya kegiatan dakwah.

Dakwah sebagai suatu kegiatan komunikasi keagamaan dihadapkan pada perkembangan dan kemajuan teknologi komunikasi yang semakin canggih, memerlukan suatu adaptasi terhadap kemajuan itu. Artinya dakwah dituntut agar dikemas dengan terapan media komunikasi dengan mad'u yang dihadapi (Ghazali, 1997: 33).

Cara berdakwah dimanapun pada dasarnya memiliki prinsip yang sama. Baik di masjid-masjid, gedung-gedung pertemuan maupun rapat-rapat akbar. Prinsip-prinsip dakwah tidak pernah berbeda. Semuanya senantiasa berpegang kepada al-Qur'an dan sunnah Rasulullah. Akan tetapi berdakwah lewat pers tentunya memiliki teori-teori atau cara tersendiri yang sangat berkaitan erat dengan metode-metode jurnalistik yang ada dalam kaidah-kaidah ilmu komunikasi (Ardhana, 1995: 18).

Jurnalis muslim adalah juru dakwah (da'i) di bidang pers, yakni mengemban dakwah *bil qalam* (dakwah melalui tulisan). Jurnalis Islam terikat dengan nilai-nilai, norma-norma dan etika Islami. jurnalis muslim bukan hanya wartawan yang beragama Islam dan comitted dengan ajaran agamanya, melainkan juga para cendekiawan muslim, ulama, mubaligh dan umat Islam pada umumnya yang cakap menulis media massa (Romly, 1999: 88).

Jurnalistik dakwah tentunya menuntut penyajian kata-kata yang selektif dan tidak bertele-tele. Berbicara tentang materi dakwah, banyak hak yang bisa diambil atau dikemukakan kepada publik pembaca. Dakwah tidak hanya berbicara tentang hal yang dilarang atau dibenarkan oleh agama saja. Akan tetapi, dakwah harus pula melihat persoalan dan wawasan lebih luas dan global (Ardhana, 1995: 20).

Dewasa ini memilih atau menjadikan pers sebagai sarana dakwah yang efektif merupakan pilihan tepat dan positif. Meskipun masih ada yang meragukan seberapa jauh daya jangkau pers, namun setidak-tidaknya bagi masyarakat kota peranan dan kemampuan pers dalam menciptakan terjadinya perubahan atau perombakan tata kehidupan masyarakat tidak perlu diragukan lagi. Sebab perlu diingat, dakwah merupakan perjuangan untuk memenangkan yang makruf atas yang munkar, yaitu perjuangan menegakkan yang haq dan menghancurkan kebathilan serta kesewenang-wenangan (Ardhana, 1995: 21).

2.2.Ideologi Media Massa

2.2.1. Pengertian Media Massa

Salah satu unsur penting yang dapat berperan di dalam penyebaran informasi dan menumbuhkan kesadaran serta motivasi bagi sebuah perubahan masyarakat adalah media massa. Hal ini disebabkan pada satu persepsi bahwa salah satu kebutuhan manusia yang sangat

mendasar baik secara individu maupun sebagai anggota masyarakat adalah adanya kebutuhan untuk berbagai tujuan. Dalam hubungan ini kehadiran media sebagai sarana penyampaian informasi menjadi penting artinya.

Dalam abad modern seperti ini, kehidupan masyarakat tidak dapat dipisah-pisahkan lagi dari kebutuhan komunikasi dan media sebagai sarana tercapainya komunikasi tersebut. Dalam kaitannya ini B. Aubrey Fisher memberikan istilah komunikasi bermedia. Menurut hal ini adalah untuk membedakan secara jelas antara komunikasi interpersonal dengan komunikasi massa (Fisher, 1986 : 170).

Secara umum para ahli komunikasi memberikan batasan, yakni merupakan sarana penghubung dengan masyarakat seperti: surat kabar, majalah, radio, televisi, film dan lain-lain.

J.B. Wahyudi memberikan batasan, yakni merupakan sarana untuk "menjual" informasi atau berita kepada konsumen yang dalam hal ini dapat berupa pembaca, pendengar, maupun pemirsa, yang mana mereka lazim disebut sebagai audience (Wahyudi, 1991 : 55).

Sedangkan Dja'far H. Assegaf mengartikan (1983 : 129) media massa sebagai sarana penghubung dengan masyarakat seperti surat kabar, majalah, buku, radio dan televisi.

Sebagaimana disebutkan oleh Drs. Jalaluddin Rahmat, bahwa komunikasi massa adalah pesan yang dikomunikasikan melalui media massa pada sejumlah khalayak yang tersebar, heterogen dan anonim

melalui media massa cetak atau elektronik sehingga pesan yang sama dapat diterima secara serentak dan sesaat (Jalaludin, 1999 : 189).

Dari berbagai definisi media massa yang telah dijelaskan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa, media massa digunakan dalam proses komunikasi yang dilakukan secara massal dengan menggunakan media teknologi komunikasi massa.

2.2.2. Karakteristik Media Massa

Untuk suksesnya komunikasi massa kita perlu mengetahui sedikit banyak ciri komunikasi itu, yang meliputi sifat-sifat unsur yang mencakupnya. Prof. Drs. Onong Uchjana Effendi, memberikan lima ciri-ciri (Uchjana, 1993 : 35). Diantaranya:

1. Sifat komunikasi

Komunikasi ditujukan kepada khalayak yang jumlahnya relatif besar dan heterogen. Ciri khas dari komunikasi melalui media massa ini ialah pertama bahwa jumlah yang besar itu hanya dalam periode waktu yang singkat saja. Kedua, komunikasi massa sifatnya heterogen. Selain itu komunikator tidak tahu apa pesan yang disampaikan menarik perhatian atau tidak.

2. Sifat media massa

Sifat media massa adalah serempak cepat. Yang dimaksudkan dengan keserempakan kontrak antara komunikator dan komunikasi yang demikian besar jumlahnya. Selain itu sifat media

massa adalah cepat. Artinya memungkinkan pesan yang disampaikan kepada begitu banyak orang dalam waktu yang cepat.

3. Sifat pesan

Sifat pesan media massa lebih umum. Media massa adalah sarana menyampaikan pesan kepada khalayak, bukan untuk sekelompok orang tertentu. Karena pesan komunikasi massa bersifat umum, maka lingkungannya menjadi universal, mengakui segala hal dan dari berbagai tempat.

Sifat lain media massa adalah sejenak (transient), hanya sajian seketika.

4. Sifat komunikator

Karena media massa adalah lembaga atau organisasi, maka komunikator dalam media massa, seperti wartawan, sutradara, penyiar radio, TV adalah komunikator terlembagakan. Media massa merupakan organisasi yang kompleks. Pesan-pesan yang sampai kepada khalayak adalah hasil kerja kolektif. Oleh karena itu, berhasil tidaknya komunikasi massa ditentukan berbagai faktor yang terdapat dalam organisasi media massa. Berita yang disusun oleh seorang wartawan tidak akan sampai kepada pembaca kalau tidak dikerjakan oleh redaktur, lay out, juru cetak dan karyawan lain dalam organisasi surat kabar tersebut.

5. Sifat efek

Sifat komunikasi melalui media massa yang timbul pada komunikasi bergantung pada tujuan komunikasi yang dilakukan oleh komunikator. Apakah tujuannya agar tahu saja, atau agar komunikasi berubah sikap dan pandangannya, atau komunikasi berubah tingkah lakunya.

2.2.3. Fungsi dan Peran Media Massa

Sebagaimana diketahui bahwa setiap institusi mempunyai fungsinya sendiri. Demikian pula dengan media massa sebagai institusi sosial mempunyai fungsi penting dalam komunikasi massa itu tentunya berbeda di negara yang berbeda, di negara satu dengan negara yang lainnya.

J.B. Wahyudi memberikan keterangannya berkaitan dengan fungsi media massa, walaupun pada hakekatnya jenis media massa yang satu dengan yang lain berbeda, namun pada prinsipnya mempunyai lima kesamaan fungsi (Wahyudi, 1991 : 91), yaitu:

1. *The surveillance of the environment*

Yakni mengamati lingkungan atau dengan kata lain perkataan berfungsi sebagai penyaji berita atau penerangan. Dalam hal ini media massa harus memberikan informasi yang obyektif kepada pembaca mengenai apa yang terjadi di dunia. Dalam kaitan ini fungsi utama media massa adalah sebagai penyebar informasi atau pemberitaan kepada khalayak.

2. *The correlation of the parts of society in responding to the environment.*

Artinya bahwa setelah media massa berfungsi sebagai sarana pemberitaan yang ada di lingkungannya, juga mengadakan korelasi antara informasi yang diperoleh dengan kebutuhan khalayak sasaran, karenanya pemberitaan atau komunikasi lebih menekankan pada seleksi, evaluasi dan interpretasi.

3. *The transmission of the social heritage from one generation to the next.*

Yakni sebagai penyalur aspirasi nilai-nilai atau warisan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Atau dengan kata lain perkataan sebagai penyampai seni budaya dan penunjang pendidikan dapat dikatakan bahwa di negara-negara berkembang yang rakyatnya belum maju, komunikasi dalam banyak hal merupakan sarana pembelajaran.

4. *Entertainment (hiburan)*

Baik radio, televisi maupun surat kabar ataupun majalah mempunyai fungsi hiburan bagi khalayak. Radio dengan kelebihan audionya banyak menampilkan musik, sandiwara dan lain sebagainya. Televisi kekuatan audio visualnya mampu memberikan hiburan yang cukup lengkap, selain ini media massa ini merupakan sarana hiburan yang relatif murah.

5. *To sell goods for us (iklan)*

Peran radio, televisi dan film mempunyai fungsi penyalur iklan yang efektif. Radio, walaupun ini pesannya hanya audio (suara), tetapi mempunyai daya jangkau yang relatif besar. Film kaerna disajikan ke audio visual walaupun daya jangkanya relatif kecil tetapi mempunyai daya rangsang yang cukup tinggi. Televisi selain mempunyai daya jangkau yang relatif besar juga mempunyai daya rangsang yang sangat tinggi, karena audio visual sinkron dengan hidup.

Peran media massa di negara berkembang dan negara maju terdapat perbedaan. Di negara berkembang peran pers lebih menunjuk pada peran yang membangun untuk memberi informasi, mendidik dan menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan. (Rahmadi, 1990 : 17).

Peran media massa adalah sebagai berikut:

1. Sebagai alat perubahan sosial dan pembaharuan masyarakat.

Termasuk dalam pengertian media massa adalah media elektronik (radio, televisi, film dan sebagainya), dan media tercetak (print media) seperti surat kabar, majalah, tabloid, buletin dan sebagainya. Peranan media massa yang cocok dalam hal ini adalah sebagai agen perubahan (*agent of change*), demikian kata Wilbur Schramm, letak peranannya adalah membantu menciptakan proses peralihan masyarakat tradisional ke modern. Media massa sebagai agen perubahan mempunyai beberapa tugas memperluas cakrawala

pandangan, memusatkan perhatian khalayak dengan pesan-pesan yang ditulisnya, menumbuhkan aspirasi, menciptakan suasana membangun (Rohmadi, 1990 : 17).

2. Sebagai pembentuk pendapat umum

Peran media massa selain melakukan pemberitaan kepada masyarakat juga berperan dalam pembentuk pendapat umum. Bahkan dapat berperan aktif dalam meningkatkan kesadaran politik rakyat. Hal ini didasarkan bahwa selain isi pesan media massa memuat berita atau uraian berita, juga pendapat-pendapat ini dapat perorangan, lembaga media massa yang kesemuanya itu isi pesannya bersifat umum sehingga dapat menimbulkan reaksi pro dan kontra dalam masyarakat. Pro dan kontra inilah yang disebut sebagai pendapat umum (Wahyudi, 1990 : 99).

2.2.4. Ideologi Media Massa

Perkembangan teori komunikasi dan budaya yang kritis telah membawa perhatian pada ideologi, kesadaran, dan hegemoni. Ideologi adalah sistem ide-ide yang diungkapkan dalam komunikasi; kesadaran adalah esensi atau totalitas dari sikap, pendapat, dan perasaan yang dimiliki oleh individu atau kelompok-kelompok. Hegemoni adalah proses di mana ideologi “dominan” disampaikan, kesadaran dibentuk, dan kuasa sosial dijalankan.

Istilah ideologi mempunyai dua pengertian yang bertolak belakang. Secara positif, ideologi dipersepsikan sebagai suatu pandangan dunia (worldview) yang menyatakan nilai-nilai kelompok

sosial tertentu untuk membela dan memajukan kepentingan-kepentingan mereka. Sedangkan secara negatif, ideologi dilihat sebagai suatu kesadaran palsu, yaitu suatu kebutuhan untuk melakukan penipuan dengan cara memutarbalikkan pemahaman orang mengenal realitas sosial (Sobur, 2006: 61).

Berita tidaklah dibentuk dalam ruang hampa. Berita diproduksi dari ideologi dominan dalam suatu wilayah kompetensi tertentu. Penjelasan sosio-historis ini membantu menjelaskan bagaimana dunia disistematisasikan dan dilaporkan dalam sisi tertentu dari realitas. Karena pengertian tentang peristiwa itu dimediasi oleh kategori, interpretasi dan evaluasi atas realitas. Ideologi di sini tidaklah selalu harus dikaitkan dengan ide-ide besar. Ideologi juga bisa bermakna politik penandaan atau pemaknaan., bagaimana kita melihat peristiwa dengan kacamata dan pangan tertentu, dalam arti luas adalah sebuah ideologi. Sebab dalam proses melihat dan menandakan peristiwa tersebut. Posisi itu menggambarkan bagaimana peristiwa dijelaskan dalam kerangka berpikir tertentu. (Eriyanto, 2005: 130-131).

Sebagai area ideologis, peta semacam ini dapat dipakai untuk menjelaskan bagaimana perilaku dan realitas yang sama bisa dijelaskan secara berbeda, karena memakai kerangka yang berbeda. Masyarakat atau komunitas dengan ideologi yang berbeda akan menjelaskan dan meletakkan peristiwa yang sama tersebut ke dalam peta yang berbeda, karena ideologi menempatkan nilai-nilai bersama yang dipahami dan

diyakini secara bersama-sama dipakai untuk menjelaskan berbagai realitas yang hadir setiap hari (Eriyanto, 2005: 128).

Pada era Orde Baru, pers Indonesia akrab dengan sebutan pers pembangunan, atau dalam istilah yang lebih Ideologis; Pers Pancasila, konsep “Pers Pembangunan” atau “Pers Pancasila”. Kedua istilah ini mencerminkan besarnya kemauan politik dan “harapan ideologis” terhadap arah tertentu yang harus dituju oleh pers. (Sobur, 2006: 158).

“Pembangunan” kerap disebut-sebut sebagai salah satu contoh ideologis penting pada masa rezim Orde Baru. Dan semua produk ideologis. Memang benar bahwa produk itu mempunyai sifat yang khusus, mempunyai arti, makna, nilai yang dalam. Akan tetapi, makna-makna dan nilai-nilai itu diwujudkan dalam benda-benda dan tindakan-tindakan material. Produk itu tidak dapat direalisasikan/disadari di luar material yang dikembangkan. Lewat materi itulah produk disebut menjadi bagian dari realitas yang mengitari manusia (Sobur, 2006: 157).

Tampaknya fenomena yang berlangsung dalam industri pers menjelang berakhirnya Orde Baru, yang bertumpu pada *frame* semacam “pembangunan” tidak bisa lagi dipergunakan oleh rezim Orde Baru sebagai wacana legitimasi eksistensi mereka. Terlebih lagi setelah media mengemas pemberitaan seputar krisis ekonomi dalam bingkai krisis kepercayaan, atau krisis legitimasi. (Sobur, 2006: 161).

2.3. Etika Pemberitaan

2.3.1. Pengertian Berita

Secara sosiologis berita adalah semua hal yang terjadi di dunia, seperti yang dilukiskan oleh para pakar jurnalistik, berita adalah apa yang ditulis surat kabar, apa yang disiarkan radio dan apa yang ditayangkan televisi. Berita menampilkan fakta, tetapi tidak setiap fakta merupakan berita. Berita biasanya menyangkut orang-orang, tetapi tidak setiap orang bisa dijadikan berita (Sumadiria, 2005: 63).

Berita berasal dari bahasa Sansekerta “Vrit” yang dalam bahasa Inggris disebut “Write) arti sebenarnya adalah “ada” atau “terjadi”, ada juga yang menyebut dengan “Vritta” artinya “kejadian” atau “yang telah terjadi”. “Vritta” dalam bahasa Indonesia kemudian menjadi “berita” atau “warta”. Jadi menurut artinya berita dapat dikaitkan dengan kejadian atau peristiwa yang terjadi (Djuroto, 2003: 1).

Para ilmuwan, penulis dan pakar komunikasi memberikan definisi berita yang beraneka ragam, di antaranya adalah sebagai berikut:

Williard C. Bleyer mendefinisikan berita adalah sesuatu yang termassa yang dipilih oleh wartawan untuk dimuat dalam surat kabar. Karena dia menarik minat atau mempunyai makna bagi pembaca surat kabar, atau karena dia dapat menarik para pembaca untuk membaca berita tersebut (Sumadiria, 2005: 64).

Menurut William S. Maulsby berita adalah suatu penuturan secara benar dan tidak memihak dari fakta yang mempunyai arti penting

dan baru terjadi, yang dapat menarik perhatian pembaca surat kabar yang memuat berita tersebut (Djaroto, 2003: 6).

Sedangkan Dja'far H. Assegaf mendefinisikan berita adalah laporan tentang fakta atau ide yang termassa (baru), yang dipilih oleh staf redaksi atau harian untuk disiarkan, yang dapat menarik perhatian pembaca, entah karena luar biasa, entah karena pentingnya, atau akibatnya, entah pula karena ia mencakup segi-segi hukum interest seperti humor, emosi dan ketegangan (Djuroto, 2003: 7).

Esensi kegiatan menulis berita adalah melaporkan seluk beluk suatu peristiwa apa yang telah, sedang atau akan terjadi. Melaporkan di sini berarti menulis apa yang dilihat, didengar atau dialami seorang atau sekelompok orang. Berita ditulis sebagai rekonstruksi tertulis dari apa yang terjadi (Siregar, 1998: 19).

Sebagai fakta, berita adalah rekonstruksi peristiwa melalui prosedur jurnalistik yang sangat ketat dan terukur. Dalam teori jurnalistik ditegaskan, fakta-fakta yang disajikan media kepada khalayak sesungguhnya realitas tangan kedua. Realitas tangan pertama adalah fakta atau peristiwa itu sendiri (Sumadiria, 2005: 73).

Karena merupakan realitas tangan kedua, maka berita sebagai fakta sangat rentang terhadap kemungkinan adanya intervensi dan manipulasi. Meski pada tingkatan diksi atau simbolis sekalipun (Sumadiria, 2005: 74). Pandangan ini mengandalkan seolah-olah ada realitas yang benar-benar riil yang ada di luar dari wartawan. Realitas yang riil itulah yang akan terseleksi oleh wartawan untuk kemudian

dibentuk dalam sebuah berita. Peristiwa dan realitas bukanlah diseleksi, melainkan dikreasi oleh wartawan (Eriyanto, 2002: 101).

Seorang wartawan yang mendekati obyek realitas selalu akan diharapkan dengan situasi yang membingungkan. Begitu banyak realitas yang dapat ditemukan, begitu seringnya realitas itu muncul, dan begitu cepat berlalu. Akibatnya, begitu “biasa” nya realitas itu dihadapi, sehingga tidak disadari nilainya sebagai berita. Realitas itu bisa lewat begitu saja dari perhatian (Siregar, 1998: 35).

Tidak setiap kejadian bisa dijadikan berita jurnalistik. Ada ukuran-ukuran tertentu yang harus dipenuhi agar suatu kejadian atau suatu peristiwa dalam masyarakat dapat diberitakan pers. Ini disebut sebagai kriteria layak berita, yaitu layak tidaknya suatu kejadian dalam masyarakat diberitakan oleh pers atau bernilainya kejadian tersebut bagi pers.

Hal yang menjadikan suatu kejadian atau peristiwa sebagai layak berita adalah adanya unsur penting dan menarik dalam kejadian itu. Apa yang penting dan menarik pembaca haruslah terdapat dalam sebuah berita. Karena itu unsur-unsur yang dapat menarik perhatian pembaca disebutkan sebagai unsur berita (Siregar, 1998: 25).

Unsur-unsur berita yang dipakai dalam memilih berita adalah sebagai berikut :

1. Aktual atau termassa (*time lines*)

Aktual merupakan bagian penting agar berita kita dapat menarik pembaca. Sesuatu yang baru, peristiwa yang baru terjadi,

kejadian yang masih hangat dibicarakan masyarakat lebih menarik, dibanding kejadian atau peristiwa yang sudah lama berlangsung (Dujoto, 2003: 14).

2. Jarak (*proximity*)

Jauh dekatnya jarak yang berimbas berita kita, merupakan unsur yang perlu kita perhatikan, unsur kedekatan ini tidak harus dalam pengertian fisik, tetapi juga kedekatan emosional (Sumadiria, 2005: 84).

3. Keterkenalan (*prominence*)

Nama-nama terkenal ini tidak harus diartikan orang saja. Demikian pula tempat-tempat terkenal Seperti : Museum Nasional, Gedung Gajah atau Candi Borobudur. Peristiwa-peristiwa terkenal dan situasi-situasi terkenal juga memiliki nilai berita yang tinggi (Sumadiria, 2005: 88).

4. Dampak (*consequence*)

Kejadian atau peristiwa yang memiliki akibat atau pengaruh biasanya menarik perhatian masyarakat. Ini karena sifat manusia yang egosentris selalu mementingkan dirinya sendiri. Sesuatu yang menimbulkan akibat akan menarik perhatiannya. Ini perlu diwaspadai dalam hal membuat berita (Djuroto, 2003: 18).

5. Ketertarikan manusiawi (*human interest*)

Definisi mengenai istilah human interest senantiasa berubah-ubah menurut redaktur surat kabar masing-masing dan menurut

perkembangan zaman. Tetapi yang pasti adalah bahwa berita human interest terkandung unsur yang menarik empati, simpati, menggugah perasaan khalayak pembaca (Sumandiria, 2005: 90).

2.3.2. Jenis-Jenis Berita

Ada beberapa jenis berita yang disajikan wartawan (Sumandiria, 2005 : 69-71).

1. *Straight news report* adalah laporan langsung mengenai suatu peristiwa. Misalnya, sebuah pidato biasanya merupakan berita langsung yang hanya menyajikan apa yang terjadi dalam waktu singkat. Berita memiliki nilai penyajian obyektif tentang fakta-fakta yang dapat dibuktikan. Jenis ini ditulis dengan unsur-unsur yang dimulai dari *what, who, when, where, why* dan *how* (5W + 1H).
2. *Depth news report* adalah berita mendalam, dikembangkan berdasarkan penelitian dan penyelidikan dari berbagai sumber.
3. *Comprehensive news* merupakan laporan tentang fakta yang bersifat menyeluruh ditinjau dari beberapa aspek, maksudnya mencoba menggabungkan berbagai serpihan fakta itu dalam satu bangunan cerita peristiwa sehingga benar merahnya terlihat jelas.
4. *Interpretative report* berita ini memfokuskan sebuah isu, masalah atau peristiwa-peristiwa kontroversial. Namun demikian fokus laporan beritanya masih berbicara mengenai fakta yang terbukti bukan opini.

5. *Feature story* adalah berita yang menyajikan suatu pengalaman atau berita yang pada gaya penulisan dan humor dari pada pentingnya informasi yang disajikan. Berita yang berisi cerita atau karangan khas yang berpijak pada fakta dan data yang diperoleh melalui proses jurnalistik.
6. *Depth Reporting* adalah pelaporan jurnalistik yang bersifat mendalam, tajam, lengkap dan utuh suatu peristiwa fenomena atau aktual.
7. *Investigasi Reporting* adalah berita yang dikembangkan berdasarkan hasil penelitian dan penyelidikan untuk memperoleh fakta yang tersembunyi demi tujuan.
8. *Editorial Writing* adalah pikiran sebuah institusi yang diuji di depan sidang pendapat umum. Editorial adalah penyajian fakta dan mempengaruhi pendapat umum.

2.3.3. Kode Etik Pemberitaan

Etika dalam istilah Islam lebih dikenal dengan kata "akhlak" perkataan akhlak berasal dari bahasa Arab "اخلاق". Secara luas akhlak dapat diartikan sebagai interaksi seorang hamba Allah dan sesama manusia.

Secara etimologi etika berasal dari bahasa Yunani Kuno "ethos" dalam bentuk tunggal mempunyai banyak arti yaitu, padang rumput,

kadang, kebiasaan, adat, akhlak, watak, perasaan, sikap, cara berpikir. Dalam bentuk jamak (la etha) artinya kebiasaan (Bertens, 1993 : 3).

Menurut Ahmad Amin, etika merupakan suatu ilmu yang memperlelarkan arti baik dan buruk, menerangkan apa yang seharusnya dilakukan oleh setengah manusia kepada yang lainnya, menyatakan tujuan yang harus dituju oleh manusia dalam perbuatan mereka dan menunjukkan jalan untuk melakukan apa yang harus diperbuat. (Amin, 1995 : 3).

Kata etika sering disebut dengan etik saja. Karena itu, etika merupakan pencerminan dari pandangan masyarakat mengenai apa yang baik dan buruk, serta membedakan perilaku atau sikap yang dapat diterima atau ditolak guna mencapai kebaikan dalam kehidupan bersama. Etika mengandung nilai-nilai sosial dan budaya yang disepakati bersama itu tidak selalu sama pada semua masyarakat lainnya. (Amir, 1999 : 34).

Sedangkan yang dimaksud di sini adalah kode etika profesi yaitu, norma-norma yang harus dipindahkan oleh setiap tenaga profesi dalam menjalankan tugas profesi dalam kehidupan di masyarakat. Norma-norma itu berisi apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh tenaga profesi dan pelanggaran terhadap norma-norma tersebut akan mendapatkan sanksi.

Jurnalis Islam dapat dirumuskan dengan suatu proses meliputi, mengolah dan menyebarkan berbagai peristiwa dengan muatan nilai-

nilai kebenaran yang sesuai dengan ajaran Islam, khususnya yang menyangkut agama dan umat Islam, serta berbagai pandangan dengan perspektif ajaran Islam kepada khalayak melalui media massa. (Romli, 2003 : 34).

Karena jurnalistik Islam adalah jurnalistik dakwah, maka setiap jurnalis muslim, yakni wartawan dan penulis yang beragama Islam, berkewajiban menjadikan jurnalistik Islam sebagai "ideologi" dalam profesinya. Jurnalis muslim adalah sosok juru dakwah (da'i) di bidang pers, yakni mengemban dakwah bil qalam (dakwah melalui pena dan tulisan).

Dalam hal ini terdapat peran jurnalis muslim yaitu

1. Mendidik (*muaddib*) yaitu melaksanakan fungsi edukasi yang islami, mengajak khalayak pembaca agar melakukan perintah Allah SWT dan menjauhi larangan-Nya. Selain itu juga melindungi umat dari pengaruh buruk dan perilaku yang menyimpang dari syariat Islam.
2. Sebagai pelurusan informasi (*Musaddid*)

Setidaknya ada 3 hal yang harus diluruskan oleh jurnalis muslim. Pertama, informasi tentang ajaran dan umat Islam, informasi tentang karya-karya atau prestasi umat Islam. Ketiga, jurnalis muslim dituntut mampu menggali, melakukan investigasi reporting tentang kondisi umat Islam.

3. Sebagai pembaharu (*mujaddid*)

Yakni menyebarkan paham pembaharuan akan pemahaman dan pengalaman ajaran Islam, jurnalis muslim hendaknya menjadi juru bicara dalam menyerukan umat Islam, memegang teguh al-Qur'an dan As-Sunah yang memurnikan pemahaman tentang Islam.

4. Sebagai pemersatu (*muwahid*) yaitu harus mampu menjadi jembatan yang mempersatukan umat Islam. (Ramly, 2003 : 40).

Untuk menjalankan peran-peran di atas, maka jurnalis muslim mempunyai kode etik jurnalistik sesuai dengan ajaran Islam di antaranya:

- a. Menginformasikan atau menyampaikan yang benar saja (tidak berbohong) juga tidak merekayasa atau memanipulasi fakta.
- b. Bijaksana, penuh nasehat yang baik, serta argumentasi yang jelas dan baik pula. Karakter, pola pikir, kadar pemahaman obyek pembaca harus dipahami, sehingga tulisan berita yang dibuat pun akan disesuaikan sehingga mudah dibaca dan dicerna.
- c. Meneliti kebenaran berita/fakta sebelum dipublikasikan harus melakukan check and recheck.
- d. Hindari olok-olok, penghinaan, mengejek atau caci maki sehingga menumbuhkan permusuhan dan kebencian.
- e. Hindarkan prasangka buruk (*suudzhan*). Dalam istilah hukum, pegang teguh "asas praduga tak bersalah" (Romli, 2003 : 41-43).

Selain kode etik jurnalistik muslim di atas, jurnalis muslim juga mentaati kode etik jurnalistik umum (pers). Ketaatan atau keterkaitan pada kode etik jurnalistik merupakan realisasi dari sebagai seorang jurnalis profesional sekaligus menjadi warga negara yang baik dan konstitusional". Pasal 7 (2) UU No. 40/1999 tentang pers menyebutkan "wartawan memiliki dan menaati kode etik jurnalistik". (Romly, 2003 : 43).

2.3.4. Media dan Berita dilihat dari Pandangan Konstruksionis

Globalisasi yang ditandai dengan perkembangan pesat teknologi komunikasi menjadi tolok ukur kemajuan suatu bangsa. Bahkan, kemajuan sosial dianggap dapat tercipta karena adanya pengembangan segala bentuk komunikasi yang mendunia (Chusmeru, 2001: 95).

Media massa baik cetak maupun elektronik merupakan salah satu sarana informasi yang memiliki pengaruh besar dalam mengarahkan masyarakat dan menyaring berbagai paham dan pemikiran yang berkembang. Wartawan muslim sangat berpeluang memanfaatkan sarana-sarana tersebut untuk mengabdikan dan menyebarkan dakwah Islam (Raqith, 2001: 108).

Konsep dakwah idealnya adalah dakwah yang tidak menyempitkan cakrawala umat dalam emosi keagamaan dan keterpencilan sosial. Dakwah yang diperlukan adalah yang mendorong pelaksanaan partisipasi sosial. Kini dakwah seolah semakin redup di tengah gemerlapnya arus modernisme. Kegersangan spiritual pun

semakin parah melanda umat manusia. Sehingga nafsu angkara murka semakin merajalela (Daulay, 2001: 7).

Al-Zastrouw (Winarko, 2000: xi), memberikan gambaran bahwa keterbukaan arus informasi yang terjadi di Indonesia sekarang sangat berpengaruh terhadap biasnya sebuah informasi yang beredar, namun demikian derajat kebiasaan dari media tersebut berbeda. Ada media yang derajat biasnya rendah sehingga cenderung obyektif, dan ada pula yang bobot biasnya sangat tinggi, sehingga berita dan analisis yang disajikan justru berbeda jauh dengan fakta yang ada. Lebih lanjut Al-Zastrouw mengungkapkan bahwa setidaknya semua itu dipengaruhi oleh tiga hal antara lain: kapasitas dan kualitas pengelola media, kuatnya kepentingan yang sedang bermain dalam realitas sosial, serta taraf kekritisian dari masyarakat. (Sobur, 2004: 35). Jika kita hendak menyandarkan kasus ini pada al-Qur'an kita dapat merujuk ayat berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْحَبُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ. (الحجرات: 6)

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu." (QS. al-Hujurat: 6). (Depag, 1993: 846).

Diharapkan kita sebagai kaum muslim dapat dan mampu mengaplikasikan ayat tersebut dalam menganalisis sebuah berita yang sampai kepada kita.

Seksualitas dan pornografi bukanlah persoalan baru bagi manusia, ia adalah bagian dari potensi manusia. Seksualitas bisa menjadi kejahatan manakala diterapkan dalam kerangka perilaku yang di luar aturan yang ada “disepakati” oleh masyarakat sebagai seksualitas yang baik dan perbuatan yang tidak melanggar hukum, semisal pornografi dan pornoaksi. Dengan demikian, seksualitas dinyatakan menjadi masalah manakala masyarakat masih ketat terhadap norma, sebaliknya bila masyarakat tidak lagi memiliki “norma yang pasti” (selalu bergeser) maka suatu saat yang sekarang dianggap penyimpangan seksualitas akan dapat dianggap biasa. Maka, jika masyarakat lemah dalam upaya menegakkan hukum, boleh jadi perbuatan yang kini dikategorikan kejahatan suatu saat dipandang sebagai kehebatan. Maka kini perlu norma dan hukum yang tidak rentan terhadap pergeseran perilaku manusia, baik ia menurut sosiologis, antropologis maupun psikologis (Zuhdi, 2004: 153).

Pornografi dan pornoaksi menjadi sengketa, seolah sudah tidak jelas mana yang hak dan benar. Hal ini terjadi karena mendefinisikan sesuatu hanya berdasarkan akal dan rasa semata, tanpa melibatkan standar penentu kebenaran, yaitu agama. Pengertian menurut sosiologis, pornoaksi tidak terlepas dari pengertian kebiasaan dan adat. Pengertian ini menjadikan aurat bisa menjadi berubah-ubah sesuai dengan situasi dan kondisi. Sedangkan menurut psikologis, setiap wanita adalah bersifat instingtif untuk menunjukkan lekuk tubuh, gemulai dan bangga

akan kecantikannya, dan itu katanya adalah wajar dan kebutuhan psikologisnya demikian. Namun semua definisi dan pengertian di atas bertentangan dengan syariat Islam (Zuhdi, 2004: 138).

Berita menurut pandangan konstruksionis adalah konstruksi atas realitas. Pandangan ini didasarkan pada asumsi bahwa tidak ada realitas, yang ada hanyalah konstruksi atas realitas. Karena itu pertanyaan pokoknya adalah bagaimana media mengembangkan pemberitaannya. Bagaimana suatu peristiwa dipahami dan dimaknai oleh media (Eriyanto, 2005: 26).

Fakta/peristiwa adalah hasil konstruksi. Bagi kaum konstruksionis, realitas itu bersifat subjektif. Realitas itu hadir, karena dihadirkan oleh konsep subjektif wartawan. Realitas tercipta lewat konstruksi, sudut pandang tertentu dari wartawan. Di sini tidak ada realitas yang bersifat objektif, karena realitas itu tercipta lewat konstruksi dan pandangan tertentu. Realitas bisa berbeda-beda, tergantung pada bagaimana konsepsi ketika realitas itu dipahami oleh wartawan yang mempunyai pandangan berbeda (Eriyanto, 2005: 19).

Pandangan konstruksionis mempunyai posisi yang berbeda dibandingkan positivis dalam menilai berita. Dalam pandangan positivis, media dilihat sebagai saluran. Media adalah sarana bagaimana pesan disebarkan dari komunikator ke penerima (khalayak). Media di sini dilihat murni sebagai saluran, tempat bagaimana transaksi pesan

dari semua pihak yang terlibat dalam berita. Pandangan semacam ini, tentu saja melihat media bukan sebagai agen, melainkan hanya saluran.

Media dilihat sebagai sarana yang netral. Kalau ada berita yang menyebutkan kelompok tertentu atau menggambarkan realitas dengan citra tertentu, gambaran semacam itu merupakan hasil dari sumber berita (komunikator) yang menggunakan media untuk mengemukakan pendapatnya. Pendeknya, media di sini tidak berperan dalam membentuk realitas. Apa yang tampil dalam pemberitaan itulah yang sebenarnya terjadi. Media hanya saluran untuk menggambarkan realitas, menggambarkan peristiwa.

Dalam pandangan konstruksionais, media dilihat sebaliknya. Media bukanlah sekadar saluran yang bebas, ia juga subjek yang mengkonstruksi realitas, lengkap dengan pandangan, bias, dan pemihakannya. Disini media dipandang sebagai agen konstruksi sosial yang mendefinisikan realitas.

Pandangan semacam ini menolak argumen yang menyatakan media seolah-olah sebagai tempat saluran bebas. Berita yang kita baca bukan hanya menggambarkan realitas, bukan hanya menunjukkan pendapat sumber berita, tetapi juga konstruksi dari media itu sendiri. Lewat berbagai instrumen yang dimilikinya, media ikut membentuk realitas yang tersaji dalam pemberitaan. (Eriyanto, 2005: 20-23).

Berita bersifat subjektif/konstruktif atas realitas. Pandangan konstruksionis mempunyai penilaian yang berbeda dalam menilai

objektivitas jurnalistik. Hasil kerja jurnalistik tidak bisa dinilai dengan menggunakan sebuah standar yang riil. Hal ini karena berita adalah produksi dari konstruksi dan pemaknaan atas realitas. Pemaknaan seseorang atas suatu realitas bisa jadi berbeda dengan orang lain, yang tentunya menghasilkan "realitas" yang berbeda pula.

Kaum konstruksionis melihat wartawan layaknya agen/aktor pembentuk realitas. Wartawan bukanlah pemulung yang mengambil fakta begitu saja. Karena dalam kenyataannya, tidak ada realitas yang bersifat eksternal dan objektif, yang berada di luar diri wartawan. (Eriyanto, 2005: 27-30).

Salah satu sifat dasar dari penelitian yang bertipe konstruksionis adalah pandangan yang menyatakan peneliti bukanlah subjek yang bebas menilai. Pilihan etika atau keberpihakan peneliti menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses penelitian (Eriyanto, 2005: 33).

Pandangan konstruksionis mempunyai pandangan yang berbeda. Khalayak bukan dilihat sebagai objek yang pasif. Ia juga subjek yang aktif dalam menafsirkan apa yang dia baca. Sebuah foto yang sebenarnya dimaksudkan untuk mengkomunikasikan stop kekerasan dan seksual, bisa jadi dimaknai pembaca sebagai menyebarkan pornografi. Kalau terjadi perbedaan semacam ini, bukanlah berarti berita tersebut buruk. (Eriyanto, 2005: 36).

BAB III
PEMBERITAAN SUARA MERDEKA TENTANG RANCANGAN
UNDANG-UNDANG ANTI PORNOGRAFI DAN PORNOAKASI
(RUU APP)

3.1. Profil Suara Merdeka

3.1.1. Sejarah Singkat Suara Merdeka

Suara Merdeka lahir pada era pasca kemerdekaan, yaitu tahun 1950. Pada mulanya koran ini terbit sore hari, dicetak dengan oplah 5000 eksemplar. Surat kabar ini dikelola secara sederhana hanya dibantu 2 wartawan, 2 meja dan 2 mesin ketik, karena belum memiliki mesin cetak sendiri, pencetakan Suara Merdeka menumpang cetak di harian “De Locomotief” di Jalan Kepodang Semarang.

Pada saat lahir, Indonesia baru berusia lima tahun, sehingga suasana waktu itu masih suasana euphoria kemerdekaan. Bangsa Indonesia juga belum banyak memiliki sarana media untuk menyalurkan aspirasinya, sehingga diterbitkanlah dengan nama Suara Merdeka, yang berarti menyuarakan kemerdekaan bangsa. (Dadang, 2008: 1).

Dalam perkembangannya, para pengasuh koran ini pernah mencanangkan Suara Merdeka sebagai koran nasional yang terbit di Semarang. Semua itu tidak akan terpisah dari misi awal, walaupun

hakikatnya lebih terkait dengan tuntutan komitmen ideal sekaligus kesadaran akan potensi posisi pasar koran ini dalam perspektif bisnis.

Sebutan sebagai pers nasional menunjuk komitmen harian ini kepada kepentingan nasional, sedangkan penyebutan Semarang dan Jawa Tengah menunjuk pada fakta historis, sosiologis dan geografis sebagai koran yang dijaga untuk selalu menjadi terbesar dan terkemuka di Provinsi ini.

Suatu kenyataan bahwa perkembangan Suara Merdeka tidak terlepas dari usaha-usaha tanpa kenal lelah yang dirintis oleh H. Hetami dan kemudian diteruskan oleh para penerusnya. Pada tanggal 11 Februari 1981 para pendiri dan perintisnya menyepakati cita-cita untuk menjadikannya sumber kebutuhan informasi demi kemajuan bangsa dan memberi nikmat kepada pengasuh serta manfaat bagi masyarakat (Dadang, 2008: 1).

Regenerasi kepemimpinan Suara Merdeka berlangsung sejak 11 Februari 1982, ketika H. Hetami menyerahkan pengelolaan koran pada menantunya, Ir. H. Budi Santoso. H. Hetami wafat pada tanggal 8 Februari 1986, ketika para tokoh wartawan se-Indonesia berkumpul di Yogyakarta untuk merayakan Hari Pers Nasional tanggal 9 Februari 1986.

Misi awal Suara Merdeka adalah memperdengarkan suara rakyat yang baru memperoleh kemerdekaannya. H. Hetami berpendapat bahwa aspirasi dan hati nurani rakyat perlu ditampung

oleh media yang dikelola oleh pejuang-pejuang pers. Pada mulanya koran tersebut terbit sore hari, empat halaman dan dicetak hanya dibantu dua karyawan, dua meja dan dua mesin ketik. Untuk mencetaknya, Suara Merdeka menumpang di harian "*De Locomotief*" Jalan Kepodang Semarang, tetapi yang paling menggembirakan adalah ketika Suara Merdeka mendapat kehormatan dan kepercayaan sebagai satu-satunya koran di Jawa Tengah yang diambil langganan secara kolektif oleh kesejahteraan Teer IV (Kodam IV/Diponegoro sekarang) sebanyak 1000 eksemplar tiap hari untuk dibagikan kepada kesahian-kesahiannya.

Sayang, perkembangan yang belum maksimal itu terhambat dikarenakan adanya "Gunting Syarifuddin" yang memperkecil nilai mata uang menjadi separuh, selain itu pada tahun 1961 ada pemogokan dipercetakan De Locomotief, maka harian Suara Merdeka harus dicetak di Yogyakarta selama satu tahun lebih. Meski demikian, berkat usaha kerja keras pengasuhnya, yang sangat kreatif, dengan memunculkan rubrik-rubrik yang khas seperti Semarangan, Sirpong sebagai pojok, kemudian di Grundel dan jangan disepelekan Kliblokosuto, sebagai rubrik satu halaman bisa mengatasi cobaan demi cobaan bahkan makin lama makin mendapatkan kepercayaan karena sudah berakar di kalangan pembaca.

Hal itu yang menjadikan Suara Merdeka terjepit. Hingga suatu ketika harus menyelamatkan diri dengan mengubah nama menjadi

harian Berita Yudha edisi Jawa Tengah. Untung saja keadaan yang sangat sumpek bagi kehidupan pers nasional itu berakhir dengan hancurnya Partai Komunis Indonesia (PKI). Orde Baru memberi peluang kepada pers nasional untuk kembali kepada jati diri masing-masing. Dan dengan izin Jendral Ibnu Subroto, yang ketika itu memimpin Berita Yudha, nama Suara Merdeka dipulihkan kembali.

3.1.2. Motto Suara Merdeka

Motto awal Suara Merdeka yang terbit pada 11 Februari 1950 di Semarang adalah memperdengarkan suara rakyat yang baru saja merdeka. Gambaran idealnya waktu itu, aspirasi dan suara hati nurani rakyat perlu ditampung oleh media yang dikelola oleh pejuang pers. Sedangkan dalam sisi praktis pendiri harian ini menyebutkan penerbitan koran juga dimaksudkan membuka lapangan kerja dan berperan serta dalam pembangunan.

Motto Suara Merdeka yaitu;

- Independent; menempatkan kepentingan umum di atas kepentingan kelompok.
- Objektif; pemberitaannya tidak diwarnai oleh pamrih dan harus seimbang.
- Tanpa prasangka; wartawan dalam membuat berita harus bebas dari opini pribadi.

Motto ini sejak tahun 2004 tidak lagi dicantumkan. Motto yang dipakai sekarang adalah “Perekat Komunitas di Jawa Tengah”. Meskipun tidak lagi dipakai motto tersebut bukan berarti hilang begitu saja. Motto tersebut tetap melekat di benak dan hati sanubari semua karyawan Suara Merdeka Group.

Pemakaian motto baru “Perekat Komunitas di Jawa Tengah” dimaksudkan sebagai upaya untuk lebih dekat dengan pembaca dan mengikuti perkembangan zaman yang makin melesat. (Aci, 16 Mei 2008).

Komitmen yang merupakan kombinasi idealistis dan realistis itu diraih dengan motto yang akan selalu diaktualkan oleh generasi penerus, yakni independen-obyektif. Tanpa prasangka yang telah dicanangkan oleh perintisnya, yang dalam perkembangannya mewujudkan sebagai upaya visioner untuk memposisikan Suara Merdeka, dengan segala kematangan tampilan isinya, menjadi moderator sekaligus perekat seluruh komunitas Jawa Tengah (Aci, dkk, 16 Mei 2008).

3.1.3. Struktur Organisasi Suara Merdeka

Pendiri : H. Hetami

Pimpinan Umum/Pimpinan Perusahaan

Ir. Budi Santoso

Pimpinan Redaksi:

Sasongko Tedjo

Redaksi

Wakil Pimpinan Redaksi: Hendro Basuki, Amir Machmud NS.
Redaktur Senior: Mas Soesiswo, Sudarto. **Redaktur Pelaksana:** Heryanto
 Bagas Pratomo, A Zaini Bisri, Sri Mulyadi. **Koordinator Liputan:** Cocong
 Arief Priyono, Sumaryono. **Sekretaris Redaksi:** Eko Hari Mudjiharto.

Alamat Redaksi:

Jl Raya Kaligawe KM 5 Semarang 50118
 Telepon: (024) 8580900, 6581925,
 Faks: (024) 6580605.
 Email: redaksi@suaramer.famili.com

Alamat Redaksi Kota

Jl. Pandanaran No 30 Semarang 50241. Telepon: (024) 8412600.
 Telepon: (024) 8412600.
 Faks: (024) 8411116, 8447858.
 (Suara Merdeka, 10 Mei 2008)

3.2. Pemberitaan Suara Merdeka Tentang Pro-Kontra RUU APP

Penyusunan Rancangan Undang-Undang Anti Pornografi dan Pornoaksi yang dibahas oleh Pansus DPR pada tahun 2006 menuai reaksi yang beragam dari berbagai kalangan. Pansus yang dibentuk DPR berusaha menampung berbagai masukan dari berbagai komponen, masukan-masukan tersebut selain memperkaya khasanah pansus, juga sebagai bentuk akomodasi terhadap penyusunan RUU APP, akan tetapi masukan tersebut justru menambah kontroversi baru baik terhadap pihak yang setuju atau yang menentang keberadaan pemberlakuannya, serta yang sekedar menyangkut batasan pengertian pornografi dan pornoaksi itu.

Perdebatan mengenai rancangan undang-undang antipornografi dan pornoaksi (RUU APP) menggulirkan beragam pendapat. Kondisi ini jelas sangat sehat dalam iklim demokrasi yang memberi ruang bagi anggota

ataupun kelompok masyarakat untuk menyuarakan aspirasi mereka. Tajamnya ragam pendapat yang terbelah pada kubu pro dan kontra mengindikasikan masih ada yang belum pas dalam RUU tersebut untuk mengakomodasi berbagai pandangan masyarakat. Kita memahami, logika pornografi dan pornoaksi memang terkait dengan pernik-pernik persepsi baik menyangkut moralitas, fakta-fakta pergaulan sosial maupun arus global informasi-mediatisasi.

Secara garis besar ada dua persoalan mengenai berita tersebut. Pertama, terkait dengan penolakan RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi,. Hal ini juga bisa terpengaruh dengan Pakaian Nasional. Setiap daerah kan punya Pakaian adat masing-masing, dan RUU ini tidak mengakui keragaman di Indonesia. Kedua, mendukung RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi, tidak etis jika dibenarkan menyiarkan pornografi. Akan tetapi dengan dalih kebebasan pers dan seni, sekarang penerbitan pornografi sepertinya tak dapat dibatasi.

RUU APP sebagai instrumen untuk mengeliminasi fenomena pornografi dan pornoaksi dapat menjadi model yang merepresentasikan realitas di masyarakat, bukan sebaliknya menyeragamkan keanegaraman yang ada pada pola pandang, pemikiran, dan perilaku seluruh masyarakat.

Di antara kelompok yang menentang RUU APP adalah dari kalangan seniman dan seniwati. Bukan semata-mata beralasan karena RUU itu dianggap bisa menghambat kreativitas seni, tetapi juga karena mereka merasa khawatir jika sumber mata pencahariannya ditutup gara-gara

dianggap bertentangan dengan undang-undang. Bagaimanapun seluruh manusia di dunia pemikirannya selalu dipengaruhi oleh kebutuhan dasar yang antara lain adalah kebutuhan akan pangan, sandang, dan papan.

Kelompok yang setuju menganggap RUU APP sebagai “jalan masuk” ke arah penerapan syariat Islam dalam kehidupan masyarakat. Argumen kelompok yang pro dilandasi oleh logika, bahwa bangsa atau negara ini tengah berada dalam ancaman budaya globalisasi yang merusak moral generasi muda. Karena itu harus dihadapi dengan gerakan dan peraturan politik yang membatasi budaya globalisasi tersebut, yang diidentikkan dengan seks bebas, pergaulan bebas, dan sebagainya.

Ideologi merupakan konsep yang sentral dalam analisis framing. Hal ini karena percakapan, bahasa dan teks merupakan praktik dari ideologi ataupun merupakan pencerminan dari ideologi-ideologi tertentu. Teori klasik mengatakan bahwa ideologi dibangun oleh kelompok yang dominan dengan tujuan untuk mereproduksi dan melegitimasi dominasi mereka. Salah satu strategi yang mereka jalankan adalah dengan membuat kesadaran kepada khalayak bahwa dominasi itu diterima secara *taken for granted*.

Ideologi dari kelompok dominan hanya efektif jika didasarkan pada kenyataan bahwa anggota komunitas termasuk yang didominasi menganggap hal tersebut sebagai kebenaran dan wajar. Disini, menurut Van Dijk, dapat menjelaskan apa yang disebut sebagai “kesadaran Palsu”, bagaimana kelompok dominan memanipulasi kepada kelompok yang tidak

dominan melalui kampanye disinformasi melalui kontrol media, dan sebagainya.

Keberadaan ideologi disini menurut Van Dijk, dimaksudkan sebagai alat untuk mengatur masalah dan tindakan dan praktik individu atau golongan suatu kelompok. Ideologi akan membentuk suatu tindakan yang sama dalam satu kelompok, sehingga dapat menghubungkan suatu masalah mereka dan memberikan kontribusi dalam membentuk solidaritas dan kohesi di dalam kelompok tersebut.

Lebih lanjut ideologi disini mempunyai beberapa implikasi penting, diantaranya yang pertama adalah secara inheren bersifat sosial, tidak personal atau individual: ia memerlukan *share* kepada orang lain dalam kelompok tersebut. Dan hal yang di-*share*-kan tersebut bagi anggota kelompok digunakan untuk membentuk solidaritas dan kesatuan langkah dalam bertindak.

Kedua, meskipun ideologi bersifat sosial, ia digunakan secara internal diantara anggota kelompok atau komunitas, sehingga ideologi mampu membentuk identitas diri kelompok guna membedakan dengan kelompok yang lain.

Dalam framing ada dua aspek yang perlu diperhatikan; *Pertama*, memilih fakta/realitas. Proses memilih fakta ini didasarkan pada asumsi, wartawan tidak mungkin melihat peristiwa tanpa perspektif. Dalam memilih fakta ini selalu terkandung dua kemungkinan; apa yang dipilih (*included*) dan apa yang dibuang (*exluded*). Intinya, peristiwa dilihat dari sisi tertentu.

Kedua, menuliskan fakta, proses ini berhubungan dengan bagaimana fakta yang dipilih itu disajikan kepada khalayak. Gagasan itu diungkapkan dalam kata, kalimat, proposisi apa, dengan bantuan foto dan gambar apa, dan sebagainya. (Eriyanto, 2005: 71-72).

Untuk membedakan mana berita yang pro dan kontra perlu diketahui terlebih dahulu definisi pro maupun kontra. Hal ini digunakan untuk memudahkan membedakan mana berita pro dan mana yang kontra. Pro adalah setuju/mendukung, sedangkan kontra adalah lawan, melawan, menentang, tidak menyetujui RUU APP (Poerwadarminta, 1996: 521, 769).

Dalam pengidentifikasian berita yang pro dan kontra penulis dapat membedakan berita tersebut dengan menggunakan beberapa indikator yaitu:

1. Pemilihan istilah yang digunakan dalam penulisan berita.
2. Menonjolkan pendapat tokoh yang satu misi dengan pemberitaan.
3. Seleksi terhadap materi berita.
4. Menonjolkan informasi tertentu dan tidak menonjolkan informasi lainnya.
5. Membentuk citra tertentu. (<http://jonru.multiply.com/journal/item/207>)

Hal-hal tersebut di atas inilah yang menjadi penekanan suatu berita akan condong ke kubu yang pro atau kontra.

Secara keseluruhan berita Suara Merdeka yang memuat tentang pemberitaan Rancangan Undang-Undang Anti Pornografi dan Pornoaksi dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

TABEL I
PEMBERITAAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG ANTI
PORNOGRAFI DAN PORNOAKSI SURAT KABAR SUARA
MERDEKA BULAN MARET-APRIL 2006

NO	TANGGAL	JUDUL PEMBERITAAN
1	6 Maret 2006	Batas Akhir Masukan Masyarakat Soal RUU APP 9 Maret
2	7 Maret 2006	Pro kontra RUU APP Dikhawatirkan, Penari Telanjang Beralasan Kesenian
3	9 Maret 2006	Gubernur Diminta Bubarkan TBS Bila RUU APP Nekat Disahkan
4	10 Maret 2006	RUU APP Tak Tampung Aspirasi Budaya Etnik
5	13 Maret 2006	11 Pasal RUU APP Dihapus Termasuk Pasal Ciuman dan Pakaian.
6	19 Maret 2006	Penolak Belum Baca Draf RUU APP
7	20 Maret 2006	FPDI-P Ajukan Lima Paradigma
8	20 Maret 2006	Hasyim: Perlu Segera Disahkan
9	20 Maret 2006	Pansus Akomodasi Penolakan RUU APP
10	23 Maret 2006	Pansus RUU APP Dilanda Konflik
11	24 Maret 2006	Baleg Bantah Tudingan RUU APP Misterius
12	25 Maret 2006	SBY: Saya Terganggu Lihat Pudar Wanita
13	27 Maret 2006	Inneke: Banyak Artis Dukung RUU APP
14	27 Maret 2006	MUI Dukung SPB Tempat Ibadah
15	29 Maret 2006	DPD Dukung RUU APP Segera Disahkan
16	1 April 2006	Demo Tolak RUU APP “Disuguhi” Pemandangan Syur
17	5 April 2006	RUU APP Lebih Banyak Menjerat Korban
18	9 April 2006	Kiai NU Berkumpul di Rembang Bahas Percepatan Pembangunan Pedesaan
19	22 April 2006	Aktivis Perempuan Tolak RUU APP
20	24 April 2006	Rakor PBB Desak Pengundangan RUU APP
21	24 April 2006	Tolak Playboy, Desak Pengesahan RUU APP
22	26 April 2006	Mendukung Polisi
23	28 April 2006	Bela Inul Daratista
24	27 April 2006	Inul Terancam Diusir Gara-Gara Tolak RUU Anti Pornografi

Berikut ini penulis cantumkan berita yang mendukung RUU APP

“Penolak Belum Baca Draf RUU APP”

Suara Merdeka 19 Maret 2006

SURABAYA - Ketua Umum PP Muslimat NU Hj Khofifah Indar Parawansa menduga kelompok penolak RUU Antipornografi dan Pornoaksi (APP) belum membaca drafnya. Jadi mereka tak tahu bahwa kritik tersebut sudah diakomodasi.

"Muslimat NU mendukung RUU itu karena generasi muda harus diselamatkan dari eksploitasi. Apalagi RUU itu sudah mengakomodasi prinsip pluralisme," ujarnya, se usai berbicara dalam acara PW Muslimat NU Jawa Timur di Surabaya, kemarin.

Di sela-sela "Sosialisasi Hasil Rakornas YPM-NU dan Percepatan Keaksaraan Fungsional" yang dihadiri sekitar 100 pengurus PC Muslimat NU se-Jawa Timur, dia menyatakan Muslimat NU sudah membahas RUU APP secara tuntas pada 7 Maret. "Karena itu bagi Muslimat NU, RUU APP sudah *clear*. Apalagi RUU itu dibangun di atas prinsip pluralisme, seperti kemungkinan penerapan bagi suku-suku di pedalaman Papua atau Kalimantan yang suka buka baju atau seperti orang desa di Jawa yang pakai *kemben*," ujarnya.

Karena itu, kata dia, jika ada kelompok mempersoalkan RUU itu berarti belum membaca drafnya. "Jika mereka menyempatkan diri membaca tentu tidak memunculkan Islamisasi atau Islam-fobia. Semua tidak benar."

Mantan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan pada era Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) itu menuturkan masyarakat Bali juga tak perlu memprotes RUU APP. Sebab, RUU itu sudah mengakomodasi daerah pantai, gedung *fashion*, dan semacamnya dengan "kategori diizinkan".

"Jadi Muslimat NU menilai RUU APP sudah tak ada persoalan dari aspek pluralisme, budaya, ekonomi, dan hukum. Karena itu kalau masih juga diprotes tentu mereka perlu mengetahui ada 3,3 juta remaja putri melakukan aborsi akibat pornografi."

“Hasyim: Perlu Segera Disahkan”

Suara Merdeka, 20 Maret 2006

Semarang - Ketua Umum PBNU KH Hasyim Muzadi mengatakan, DPR tidak perlu ragu mengambil keputusan berdasarkan kepentingan bangsa dengan penuh ketegaran dan kearifan.

"PBNU mendukung sepenuhnya RUU APP untuk segera disahkan menjadi undang-undang. Hal tersebut sangat diperlukan untuk keselamatan moral masyarakat pada umumnya dan generasi muda pada khususnya," tegas Hasyim.

Dalam siaran pers yang dikirim ke Redaksi *Suara Merdeka*, Hasyim Muzadi mengatakan, untuk mengetahui dan merasakan dampak negatif dari pornoaksi dan pornografi seseorang tidak perlu menjadi fundamentalis,

apalagi ekstremis. "Cukup menjadi orang tua yang saleh dan bertanggung jawab atas keselamatan pergaulan keluarganya sehari-hari."

Menurutnya, penolakan bertubi-tubi pada RUU APP dari kelompok-kelompok tertentu tidaklah dapat menafikan dampak negatif dari pornografi/pornoaksi tersebut. Maka, perlu diupayakan jalan keluar sebaik-baiknya dalam pasal-pasal tertentu tanpa menggagalkan rancangan undang-undang itu.

"Dalam pandangan PBNU tidak ada satu agama pun yang menoleransi pornografi/pornoaksi. Karena itu, tidaklah tepat menggunakan salah satu agama untuk menyokong pornografi/pornoaksi. Jadi, kaum muslimin Indonesia, terutama warga NU, janganlah mengingkari ajaran agama sendiri hanya untuk menuruti penetrasi budaya global yang negatif. Demokrasi bukanlah sesuatu yang bebas nilai dan kebebasan berdistruksi."

Contoh berita yang kontra dengan RUU APP dalam Suara Merdeka

"Gubernur Diminta Bubarkan TBS Bila RUU APP Nekat Disahkan"

Suara Merdeka, 9 Maret 2006

SOLO - Keluarga besar lembaga Taman Budaya Jawa Tengah di Surakarta (TBS) bersama komunitas-komunitas kesenian yang dinaunginya, berharap agar Gubernur Jateng membubarkan lembaga pamong seni budaya itu apabila RUU Anti Pornoaksi dan Pornografi (APP) nekat disahkan.

Meski masih sebatas wacana, gagasan itu bisa benar-benar diwujudkan. Karena mereka menilai lembaga TBS tak lagi ada manfaatnya kalau kreativitas berkesenian diberangus dengan hadirnya undang-undang tersebut.

"Benar, kami sedang menggagas kemungkinan itu. Dan saya kira, teman-teman dari lembaga lain seperti STSI, SMKI, Keraton Surakarta, Pura Mangkunegaran dan lembaga kesenian/kebudayaan dari daerah lain pasti akan mengikuti langkah kami. Karena keberadaannya tidak ada manfaatnya lagi kalau RUU APP itu nekat disahkan," tegas Drs Murtidjono kepada *Suara Merdeka*, di kompleks TBS, Kentingan, kemarin.

Menurut Kepala TBS itu, para penyusun RUU itu salah mengartikan pornoaksi dan pornografi. Terlebih lagi, mereka itu telah mengingkari atau bahkan tidak melihat adanya realitas perbedaan di masyarakat.

Bagi kalangan masyarakat seni budaya di Surakarta, pasal-pasal dalam RUU yang mempersoalkan perihal pornoaksi dan pornografi dalam kehidupan di masyarakat, utamanya yang dilansir berbagai media, dinilai terlalu sembrono dan serampangan.

Karena perilaku yang dipersoalkan sebagai amoral tidak disertai dengan alasan-alasan logika yang kuat. Bahkan bertentangan dengan realitas kehidupan di beberapa daerah di Tanah Air.

“Aktivis Perempuan Tolak RUU APP”

Suara Merdeka, 22 April 2006

SEMARANG - Memperingati Hari Kartini, Jumat (21/4), belasan aktivis yang tergabung dalam Front Perempuan Indonesia (FPI) melakukan aksi ke jalan. Mereka menyerukan penolakan terhadap Rancangan Undang-Undang Antipornografi dan Pornoaksi (RUU APP) yang dinilai diskriminatif terhadap sebagian anak dan perempuan.

Para aktivis itu di antaranya berasal dari Setara, LRC-KJHAM, LBH Apik, KPI, DKJT, JPPA, PSW Unika, dan Komunitas SK Semarang. Mereka memulai aksi dari depan Masjid Baiturrahman. Mereka berjalan kaki sambil membawa spanduk dan poster berisi penolakan terhadap RUU APP.

Di antaranya berbunyi "RUU APP = Melanggar UUD 45", "RUU APP = Diskriminasi Perempuan", "RUU APP = Kegagalan Negara Menghapus Kemiskinan", dan "Tolak Kontrol Negara atas Tubuh Perempuan".

Sesampai di gedung DPRD Jateng di Jl Pahlawan, mereka melakukan orasi secara bergantian.

Menurut koordinator aksi Eva Risan, RUU APP tidak memberi solusi terhadap peredaran dan akses media atas pornografi sehingga upaya pencegahan kekerasan sebagai dampak tayangan media tersebut tidak akan tercapai.

Pornografi atau pornoaksi merupakan persoalan yang harus dibatasi pada ruang-ruang tertentu. Itulah sebabnya banyak kalangan yang tidak sependapat bila persoalan moral diatur karena hal itu juga sama dengan mengatur pribadi-pribadi orang lain.

Upaya beberapa pihak yang ingin tetap meloloskan RUU APP dalam kondisi pro-kontra seperti sekarang ini merupakan sikap yang tidak tercermin pada realitas komunitas di Indonesia.

Melalui proses internalisasi dan sosialisasi, orangtua biasanya mengajarkan mana yang terbaik buat anak-anaknya. Yang terbaik buat anak-anaknya adalah apa yang bagi mereka (para orang tua) baik sehingga ukurannya sangat relatif, karena pada akhirnya kepribadian orang tuanya juga terbentuk oleh dimana ia tinggal dan dengan siapa ia berkomunikasi. Termasuk di dalamnya, bagaimana orang tua mereka mengajarkan masalah

seks terhadap anak-anaknya. Jadi pandangan anak tentang seks sebenarnya sudah dimulai sejak ia berada di rumah.

Curah pikir baik secara akademik maupun logika-logika berbagai kelompok masyarakat menggambarkan dinamika tingkat kecerdasan yang semuanya harus dihargai dan tentu saja didengarkan. Dengan penyusunan RUU APP dan segala sisi pendukungnya berarti ada kehendak kita memiliki perangkat aturan untuk "mengendalikan" tampilan yang sejauh ini oleh sebagian anggota masyarakat menumbuhkan keberatan dari sisi moral. Pada sisi lain, penentangan merepresentasikan adanya suara lain yang menghendaki pengaturan tampilan itu tidak harus dengan undang-undang. Apalagi, persepsi tentang tampilan bisa saja berbeda antara daerah satu dan yang lain.

Jalan keluar tentu harus diyakini selalu terbuka sehingga kita tidak perlu harus saling bersitegang dalam benturan kepentingan persepsi antar kelompok yang berbeda. Misalnya sejauh mana sebenarnya kita menempatkan RUU APP sebagai prioritas dari banyak masalah kebangsaan dan kenegaraan yang membutuhkan perhatian untuk lebih disegerakan. Kita tidak bermaksud mengecilkan kepentingan yang ingin ditertibkan dengan perundang-undangan tersebut. Namun dibandingkan dengan memilih jalan peranti undang-undang.

Secara substansial kehadiran RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi memberi harapan kepada masyarakat untuk melindungi diri dan keluarganya terhadap bahaya pencabulan (porno), kendati kekhawatiran adanya

pembelengguan terhadap inspirasi dan kreativitas karya seni di sekitar keindahan (seks) terus bermunculan.

Sesungguhnya substansi persoalan ke-porno-an tidak seluruhnya dibahas dalam RUU tersebut. Hal ini menyangkut empat hal:

Pertama, berhubungan dengan kategorisasi dan konseptualisasi pencabulan (porno) yang tidak utuh dan terkesan terburu-buru, terkesan pula pihak-pihak yang terkait dengan RUU tersebut belum memahami konsep-konsep di sekitar wacana porno secara keseluruhan, baik secara filosofis, sejarah dan kekinian.

Kedua, salah satu fungsi hukum adalah memberi efek jera kepada pelaku pelanggaran hukum itu berupa pemberian sanksi terhadap pelanggar hukum. Efektivitas efek jera ini yang paling penting adalah kekuatan memberi rasa jera itu sendiri dengan memberi hukuman yang seberat-beratnya kepada pelanggar hukum.

Ketiga, RUU APP belum memberi ruang untuk menekan industri media massa agar tidak menjadikan wacana porno sebagai salah satu cara menekan membesarkan industri tersebut dengan berbagai alasan apapun mengingat begitu strategisnya peran media massa di masyarakat.

Keempat, RUU APP belum memberi ruang kepada masyarakat dan kelompok-kelompok masyarakat ataupun keluarga untuk berpartisipasi baik sebagai mitra pemerintah maupun badan yang dibentuk oleh pemerintah untuk menanggulangi masalah porno ini. Termasuk juga RUU tersebut

belum mengatur tentang kontrol-kontrol masyarakat kepada sepak terjang badan yang dibentuk pemerintah untuk menanggulangi masalah porno.

Peran media dalam mempengaruhi massa memang tidak dapat dipandang remeh. Hal ini terbukti dari banyaknya tanggapan yang diberikan masyarakat ketika Suara Merdeka memberitakan itu. Karena seruan tersebut, berbagai kalangan masyarakat Islam khususnya, baik muslim maupun non muslim melihat hal itu harus segera terselesaikan. Di sinilah peran Suara Merdeka dalam mengimplementasikan konsep dakwahnya walaupun materi yang disampaikan hanya sedikit.

BAB IV

**ANALISIS FRAMING TERHADAP PEMBERITAAN RANCANGAN
UNDANG-UNDANG ANTI PORNOGRAFI DAN PORNOAKSI (RUU APP)**

Framing sebagai proses membuat suatu pesan lebih menonjol, menempatkan informasi lebih dari pada yang lain sehingga khalayak lebih tertuju pada pesan tersebut. Ada dua konsepsi dari framing yang saling berkaitan. Pertama, dalam konsepsi psikologi. Konsepsi ini lebih memfokuskan pada bagaimana seseorang memproses informasi pada dirinya. Framing berkaitan dengan struktur dan proses kognitif bagaimana seseorang mengolah sejumlah informasi dan ditunjukkan dalam skema tertentu.

Dari analisis teks ini, penulis menguraikan bagaimana konstruksi mengenai pemberitaan Rancangan Undang-Undang Anti Pornografi dan Pornoaksi dalam surat kabar Suara Merdeka edisi Maret-April 2006, yang dilihat dari struktur teks berita seperti sintaksis, skrip, tematik dan retorik.

Karena penelitian ini jenis penelitian kualitatif dan bertujuan untuk meneliti secara kritis konstruktif berita mengenai pemberitaan Rancangan Undang-Undang Anti Pornografi dan Pornoaksi. Penulis mengambil seluruh berita yang dimuat pada bulan Maret-April 2006 yang keseluruhannya berjumlah 24 berita. Kemudian penulis membagi dalam 2 kategori, yaitu kategori pro dan kontra terhadap Rancangan Undang-Undang Anti Pornografi dan Pornoaksi dalam surat Suara Merdeka edisi Maret-April 2006.

4.1. Analisis Framing Terhadap Pemberitaan RUU APP

4.1.1. Analisis Framing Terhadap Pemberitaan Surat Kabar Suara Merdeka Kategori Pro Terhadap Rancangan Undang-Undang Anti Pornografi dan Pornoaksi

Frame Suara Merdeka 06 Maret 2006

“Batas Akhir Masukan Masyarakat Soal RUU APP 9 Maret”

Pornografi dan pornoaksi menjadi sengketa, seolah sudah tidak jelas mana yang hak dan benar. Hal ini terjadi karena mendefinisikan sesuatu hanya berdasarkan akal dan rasa semata, tanpa melibatkan standar penentu kebenaran, yaitu agama. Analisis sintaksis dari pandangan Suara Merdeka terwujud skema atau bagan berita dengan judul “Batas Akhir Masukan Masyarakat Soal RUU APP 9 Maret.” Perangkat sintaksis berupa *lead* yang dipilih yaitu “Wakil Pansus Rancangan Undang-undang Anti-Pornografi dan Pornoaksi (RUU APP) Komisi VIII DPR, Yoyoh Yusroh mengatakan Pansus masih memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memberikan masukan berkaitan dengan RUU tersebut sampai 9 Maret 2006.”

Kemudian dalam penyusunan berita Suara Merdeka menekankan pada pernyataan Wakil Pansus RUU APP “Masyarakat yang akan memberikan masukan diharapkan dalam bentuk tertulis atau datang langsung ke Pansus RUU APP, “katanya se usai acara Dialog Nasional” Menggagas UU APP yang Berkeadilan,” di

Monumen Bandung Lautan Api (BLA) Tegallega, Bandung, kemarin.”

Sedangkan dari struktur skrip yaitu bagaimana cara wartawan mengisahkan fakta. Secara umum teks berita Suara Merdeka mengisahkan bahwa Wakil Pansus Rancangan Undang-undang Anti-Pornografi dan Pornoaksi (RUU APP) Komisi VIII DPR, Yoyoh Yusroh mengatakan Pansus masih memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memberikan masukan berkaitan dengan RUU tersebut sampai 9 Maret 2006. Dalam teks berita ini terdapat unsur-unsur penting berita yaitu: Who (Wakil Pansus Rancangan Undang-undang Anti-Pornografi dan Pornoaksi (RUU APP) Komisi VIII DPR, Yoyoh Yusroh), What (mengatakan), How (masih memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memberikan masukan berkaitan dengan RUU).

Dari sudut tematik yaitu cara wartawan menulis fakta masyarakat Bali dan kalangan mode menolak RUU APP tersebut. Kalangan perancang mode yang menolak kehadiran RUU APP tergabung dalam sejumlah asosiasi, yakni Asosiasi Perancang Pengusaha Mode Indonesia (APPMI)

Dalam hal retorik, yaitu cara wartawan menekankan fakta. Dalam teks berita yang menekankan kata “akhir” yang mencitrakan kepada khalayak adanya aspirasi masyarakat dalam RUU APP.

Frame Suara Merdeka 07 Maret 2006

“Pro Kontra RUU APP Dikhawatirkan Penari Telanjang Beralasan Kesenian”

Masyarakat tinggal memiliki waktu hingga 9 Maret 2006, jika ingin memberikan masukan mengenai rancangan undang-undang anti Pornografi dan Pornoaksi (RUU APP). Setelah itu, Pansus DPR segera mengusulkan RUU yang berisi 11 bab dan 93 pasal tersebut kepada pemerintah untuk disahkan pada pertengahan tahun ini. Bagaimana sebenarnya substansi RUU tersebut dan tanggapan masyarakat.

Analisis sintaksis, pandangan Suara Merdeka diwujudkan dalam skema atau bagan berita. Frame Suara Merdeka tersebut tertuang dalam judul berita: “Pro Kontra RUU APP Dikhawatirkan Penari Telanjang Beralasan Kesenian” lead atau kepala berita yang dipakai Suara Merdeka juga memperlihatkan frame Suara Merdeka: “Sejumlah pelajar yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Pelajar Muslim Indonesia membakar gambar berbau pornografi, ketika menggelar aksi anti pornografi dan pornoaksi di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Dari analisis skrip, berita tersebut mengisahkan adalah who (Pansus DPR), what (RUU APP segera disahkan), why (Dikhawatirkan Penari Telanjang Beralasan Kesenian), ketika mengisahkan “why” Suara Merdeka secara jelas menjelaskan bahwa Pansus DPR segera mengusulkan RUU kepada pemerintah untuk

disahkan pada pertengahan tahun ini karena dikhawatirkan penari telanjang beralasan kesenian.

Sementara itu dari struktur tematik, berita ini membawa tema besar yang ingin ditampilkan kepada khalayak, pertama Pansus DPR segera mengusulkan RUU yang berisi 11 bab dan 93 pasal tersebut kepada pemerintah untuk disahkan pada pertengahan tahun ini. Kedua bagaimana sebenarnya substansi RUU tersebut dan tanggapan masyarakat.

Dari struktur retorik, bagaimana wartawan menekankan fakta pada gambar, yang memuat foto demonstrasi membakar gambar berbau porno. Hal ini mengasumsikan bahwa masyarakat banyak yang mendukung pengesahan undang-undang tersebut.

Frame Suara Merdeka 13 Maret 2006

“11 Pasal RUU APP Dihapus Termasuk Pasal Ciuman dan Pakaian”

Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang Anti Pornografi dan Pornoaksi (RUU APP) sepakat menghapuskan sejumlah pasal RUU itu yang kontroversial. Ada 11 pasal yang dihapus antara lain pasal soal ciuman dan pakaian. Demikian disampaikan Ketua Pansus RUU APP DPR RI Balkan Kaplale di sela-sela diskusi tentang RUU APP di Kantor PP Muhammadiyah, Menteng, Jakarta, Minggu (12/3).

Dari struktur sintaksis, Suara Merdeka mengambil headlinenya adalah “11 Pasal RUU APP Dihapus Termasuk Pasal Ciuman dan

Pakaian” judul ini dibuat untuk digunakan dalam membuat pengertian isu dan peristiwa sebagaimana mereka beberkan. Perangkat sintaksis lain yang dipakai Suara Merdeka adalah judul. Judul itu mengatakan “Pasal soal ciuman dan pakaian” judul ini memberi sudut pandang sendiri untuk memperkuat judul. Latar yang dipakai Suara Merdeka untuk mendukung gagasannya adalah Balkan menjelaskan, Pansus telah melakukan pertemuan untuk membahas kontroversi dan sejumlah masukan terhadap draf pertama RUU APP yang menghasilkan draf kedua RUU. Dalam draf pertama, RUU APP terdiri atas 11 bab dan 93 pasal. Hasil kesepakatan draf kedua, RUU AP terdiri atas 8 bab dan 82 pasal.” Latar ini bisa diamati bahwa pengutipan sumber cukup obyektif karena disampaikan oleh ketua pansus RUU APP.

Dilihat dari skrip, bagaimana wartawan mengisahkan berita. Unsur-unsur berita yang ada pada frame Suara Merdeka yaitu who (Pansus RUU APP), what (Menghapus sejumlah pasal RUU APP), why (ada 11 pasal yang dihapus antara lain pasal soal ciuman dan pakaian), where (di sela-sela diskusi tentang RUU APP di Kantor PP Muhammadiyah), how (Pansus telah melakukan pertemuan untuk membahas kontroversi dan sejumlah masukan terhadap draf pertama RUU APP yang menghasilkan draf kedua RUU. Dalam draf pertama, RUU APP terdiri atas 11 bab dan 93 pasal. Hasil kesepakatan draf kedua, RUU AP terdiri atas 8 bab dan 82 pasal.), Suara Merdeka

mengisahkan “how” secara jelas alasan pasal-pasal yang dihapuskan itu yakni pasal mengenai tindak pidana pornografi dan definisi pornografi dan pornoaksi. Pasal itu antara lain pasal soal pakaian dan ciuman di tempat umum.

Dengan menyusun skrip seperti ini, makna yang muncul dihadapan khalayak adalah informasi yang diberikan oleh ketua Pansus RUU APP benar-benar obyektif. Dari struktur tematik bisa dilihat dua tema besar yang ingin ditampilkan kepada khalayak. Pertama, pasal ciuman dan pakaian, tema kedua, “Jangan Terpancing”.

Berita Suara Merdeka ini menunjukkan bagaimana media menjadi ajang perang simbolik. Masing-masing pihak saling mengedepankan klaim atau alasan pembenar agar pendapatnya lebih diterima khalayak. Klaim-klaim yang dilontarkan tersebut sering kali disertai retorika-retorika tertentu untuk mengunggulkan pandangan dan mengecilkan pandangan pihak lain. Retorika yang digunakan harian ini adalah penggunaan bahasa dengan penafsirannya, sering dilabeli dengan keterangan bahwa penafsiran yang paling benar.

Frame Suara Merdeka 19 Maret 2006

“Penolak Belum Baca Draf RUU APP”

Frame Suara Merdeka juga bisa diperhatikan dari bagaimana wartawan menyusun fakta untuk disusun ke dalam teks berita. Analisis sintaktis judul yang digunakan Suara Merdeka adalah “Penolak Belum Baca Draf RUU APP” berita itu merupakan tingkat

kemenonjolan yang besar perangkat sintaksis yang lain adalah lead. Lead yang digunakan Suara Merdeka adalah “Ketua Umum PP Muslimat NU Hj Khofifah Indar Parawansa menduga kelompok penolak RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi (APP) belum membaca drafnya. Jadi mereka tak tahu bahwa kritik tersebut sudah diakomodasi”. Di sini ditunjukkan dengan pernyataan ketua umum PP Muslimat NU Hj Khofifah Indar Parawansa sebagai berikut:

“Muslimat NU mendukung RUU itu karena generasi muda harus diselamatkan dari eksploitasi. Apalagi RUU itu sudah mengakomodasi prinsip pluralisme”.

Bagian berita ini menggambarkan bahwa penolak yang tidak mendukung RUU APP belum baca drafnya, hal ini di tegaskan oleh ketua PP Muslimat NU kelompok penolak RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi (APP) belum membaca drafnya.

Dari struktur skrip, secara umum Suara Merdeka mengisahkan bahwa jika ada kelompok mempersoalkan RUU itu berarti belum membaca drafnya. Jika mereka menyempatkan diri membaca tentu tidak memunculkan Islamisasi.

Dari berita tersebut unsur berita yang terdapat adalah who (Khofifah Indar Parawansa), what (penolakan terhadap RUU APP), why (Jawa Timur), how (Khofifah Indar Parawansa menduga kelompok penolak RUU APP belum membaca drafnya. Jadi mereka tidak tahu bahwa kritik tersebut sudah diakomodasi), when (kapan) 18 Maret 2006.

Frame Suara Merdeka juga dapat diamati dari analisis tematik, berita ini disusun dalam dua tema. Pertama, penolakan RUU APP belum membaca draf RUU APP tersebut. Kedua, Muslimat NU mendukung RUU, hal ini diperkuat dengan penulisan berita yang ditulis oleh suara merdeka berdasarkan fakta yang ada.

Frame Suara Merdeka juga ditekankan melalui retorika tertentu. Berita itu dilengkapi oleh gambar atau foto. Foto tersebut adalah Mantan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan pada era Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) Hj. Khofifah Indar Parawansa. Foto Masdar bisa diartikan khalayak dikenalkan inilah tokoh NU yang mempunyai pemikiran modern.

Frame Suara Merdeka 20 Maret 2006

“Hasyim: Perlu Segera Disahkan”

Ketua Umum PBNU KH Hasyim Muzadi mengatakan, DPR tidak perlu ragu mengambil keputusan berdasarkan kepentingan bangsa dengan penuh ketegaran dan kearifan.

Analisis sintaksis frame Suara Merdeka tersebut tertuang dalam judul berita: “Hasyim: Perlu Segera Disahkan” penekanan berita yang dipakai Suara Merdeka juga memperlihatkan frame Suara Merdeka yaitu dengan menggunakan pernyataan ketua PBNU KH. Hazim Muzadi:

"PBNU mendukung sepenuhnya RUU APP untuk segera disahkan menjadi undang-undang. Hal tersebut sangat diperlukan untuk keselamatan moral masyarakat pada umumnya dan generasi muda pada khususnya,"

Dari analisis skrip, berita tersebut mengisahkan adalah what (RUU APP perlu segera disahkan), who (KH. Hasyim Muzadi), why (demi keselamatan moral masyarakat), where (dalam siaran pers), when (20 Maret 2006).

Sementara itu dari struktur tematik, berita ini membawa tema besar yang ingin ditampilkan kepada khalayak, Dalam pandangan PBNU tidak ada satu agama pun yang menoleransi pornografi/pornoaksi. Karena itu, tidaklah tepat menggunakan salah satu agama untuk menyokong pornografi/pornoaksi. Jadi, kaum muslimin Indonesia, terutama warga NU, janganlah mengingkari ajaran agama sendiri hanya untuk menuruti penetrasi budaya global yang negatif. Demokrasi bukanlah sesuatu yang bebas nilai dan kebebasan berdistruksi.

Dari struktur retorik, bagaimana wartawan menekankan fakta pada kata “segera”. Hal ini mengasumsikan pada khalayak bahwa ketua PBNU sangat mendukung disahkannya RUU APP.

Frame Suara Merdeka 23 Maret 2006

“Pansus RUU APP Dilanda Konflik”

Di tengah maraknya pro kontra RUU APP, ternyata di dalam tubuh pansus RUU APP sendiri sedang terjadi konflik. Beberapa anggota pansus mulai mempersoalkan cara kepemimpinan ketua pansus RUU APP, Balkan Kaplale.

Frame Suara Merdeka, juga bisa diperhatikan dari bagaimana wartawan menyusun fakta (sintaksis) untuk disusun ke dalam teks berita. Judul yang digunakan Suara Merdeka adalah “Pansus RUU APP Dilanda Konflik.” Berita itu merupakan tingkat kecenderungan berita, pembaca cenderung lebih mengingat headline itu didukung dengan lead. Lead yang digunakan adalah:

“Dukung RUU: seorang pengunjuk rasa membawa poster saat berunjuk rasa mendukung RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi di depan Istana Negara, Jakarta, Rabu (22/3). Pengunjuk rasa itu merupakan salah satu bagian dari mahasiswa yang tergabung dalam Gema Pembebasan.

Lead yang ditunjukkan untuk memperjelas sudut pandang Suara Merdeka. Berita itu juga memakai latar untuk mendukung gagasannya. Latar yang dipakai “ketua pansus RUU APP kerap menandatangani hasil keputusan pansus, tanpa sepengetahuan dan persetujuan pimpinan pansus lainnya. Antara lain, membuat laporan tertulis tim perumus pansus RUU APP di Bogor. Dengan menguraikan secara detail. Teks menekankan kepada khalayak bahwa laporan itu tidak sah, sebab dalam pembuatan laporan tersebut tidak seluruh pimpinan pansus diikutsertakan. Dari sudut skrip bagaimana cara wartawan mengisahkan fakta. Di sini frame Suara Merdeka mengisahkan konflik yang terjadi di dalam tubuh pansus RUU APP sendiri karena beberapa anggota pansus mulai mempersoalkan cara kepemimpinan ketua pansus.

Dari berita tersebut unsur berita yang terdapat dalam teks adalah who (Pansus RUU APP), what (Pansus RUU dilanda konflik), when (Kamis, 22 Maret 2006), where (Jakarta), why (konflik di dalam tubuh pansus RUU APP), how (ternyata di dalam tubuh pansus RUU APP sendiri sedang terjadi konflik. Karena beberapa anggota pansus mulai mempersoalkan cara kepemimpinan Ketua Pansus RUU APP. Balkan Kaplale). Semua unsur berita telah terdapat dalam berita itu dengan lengkapnya unsur berita yang disajikan, khalayak akan menafsirkan bahwa peristiwa yang terjadi di dalam tubuh pansus RUU APP tidak dapat dibantah. Sedangkan pandangan yang menganggap bahwa berita itu belum jelas, hanya isu destruktif belaka, tidak punya dasar, karena semua informasi tentang hal tersebut dibenarkan oleh wakil ketua pansus RUU APP Agung Sasongko.

Sementara itu dari struktur tematik, berita itu membawa tema besar yang ingin ditampilkan kepada khalayak. Tema itu adalah, Dalam tubuh pansus RUU APP sedang dilanda konflik, beberapa anggota pansus mulai mempersoalkan kepemimpinan Ketua Pansus RUU APP. Tema ini, disusun secara detail yang lengkap dan panjang lebar merupakan penonjolan yang dilakukan secara sengaja untuk menciptakan citra tertentu kepada khalayak.

Frame Suara Merdeka juga dapat dilihat dalam struktur retorik. Aspek retorik tertentu untuk menekan makna yang ingin disampaikan

kepada masyarakat umum adalah pada foto seorang pengunjung rasa dengan membawa poster saat berunjuk rasa mendukung RUU APP.

Makna yang ingin disampaikan dalam judul berita itu adalah untuk mendukung gagasan yang ingin ditonjolkan.

Frame Suara Merdeka 24 Maret 2006

“Balek Bantah Tudingan RUU APP Misterius”

Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, FX Soekarno membantah tudingan bahwa Rancangan Undang-Undang Anti-Pornografi dan Pornoaksi (RUU APP) misterius dan tidak masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2005-2009.

Dari frame Suara Merdeka, jika dianalisis sintaksis, bagaimana wartawan menyusun fakta, judul yang dipergunakan Suara Merdeka adalah “Balek Bantah Tudingan RUU APP Misterius” menunjukkan frame yang hendak dikembangkan, judul ini menjadi headline serta diperkuat dengan lead (struktur sintaksis): “Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, FX Soekarno membantah tudingan bahwa Rancangan Undang-Undang Anti-Pornografi dan Pornoaksi (RUU APP) misterius dan tidak masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2005-2009”. Dari bentuk lead yang seperti ini memberikan sudut pandang bahwa Balek membantah bahwa tudingan RUU APP Misterius.

Dalam analisis sintaksis juga ditemukan latar. Latar ini berupa kutipan informasi dari Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, FX Soekarno sebagai berikut:

“RUU APP masuk dalam Prolegnas 21. Namun demikian, RUU yang memunculkan polemik di masyarakat itu masih dalam tahap penyempurnaan draf. Jadi, masih bisa diubah sesuai dengan aspirasi dan masukan yang berkembang dari pakar atau masyarakat,” kata dia di gedung DPR, Kamis kemarin”.

Bagaimana Suara Merdeka mengisahkan fakta. Ini dapat diperhatikan melalui berita tersebut dikisahkan melalui perangkat analisis skrip. Secara keseluruhan teks berita ini mengisahkan bantahan Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, FX Soekarno terhadap tudingan bahwa RUU APP misterius dan tidak masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Dalam teks berita ini terdiri dari unsur kelengkapan berita antara lain: who (Ketua Badan Legislasi (Baleg) FX Soekarno), what (bantah), when (23 Maret 2006), where (Jakarta), why (Tudingan RUU APP misterius), how (Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, FX Soekarno membantah tudingan bahwa Rancangan Undang-Undang Anti-Pornografi dan Pornoaksi (RUU APP) misterius dan tidak masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2005-2009). Dengan adanya semua unsur-unsur berita. Fakta yang akan ditunjukkan adalah ketidakbenaran pembentukan Rancangan Undang-Undang Anti-Pornografi dan Pornoaksi (RUU APP) misterius dan tidak masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2005-2009.

Dari sudut tematik, bagaimana wartawan menulis fakta, berita ini disusun dalam tema besar “Balek Bantah Tudingan RUU APP Misterius”. Hal ini dapat diamati dari detail wawancara dengan Ketua Baleg. Tema yang disusun secara detail merupakan penonjolan yang dilakukan secara sengaja untuk menciptakan citra tertentu kepada khalayak.

Sebagai arena perang simbolik, frame Suara Merdeka juga dapat diamati dengan aspek grafis yaitu pada judul atau headline dicetak dengan huruf besar dan bercetak tebal. Huruf besar pada headline untuk mendukung arti penting suatu pesan yang ditonjolkan Suara Merdeka kepada khalayak.

Frame Suara Merdeka 25 Maret 2006

“SBY: Saya Terganggu Lihat Pusat Wanita”

Maraknya pro kontra seputar RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi (APP), juga tidak luput dari perhatian Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Presiden bahkan secara terbuka mengutarakan unek-uneknya tentang gaya hidup sebagian orang Indonesia yang dirasa mengganggu.

Dari analisis sintaksis, bagaimana cara wartawan menyusun fakta yang akan menimbulkan makna tertentu ketika diterima oleh khalayak. Judul yang dipakai oleh Suara Merdeka adalah: “SBY: Saya Terganggu Lihat Pusat Wanita”. Teks berita ini akan menunjukkan dengan tingkat kemenonjolan yang tinggi. Perangkat sintaksis lain

adalah berupa latar. Latar ini berupa kutipan dari pernyataan Presiden RI sebagai berikut:

“Gaya hidup saat ini, ada yang tidak saya suka, lihat pusar wanita, saya (merasa-red) terganggu saja. Pernah ada acara di istana, penyanyinya kelihatan pusarnya, saya suruh dia pulang, akhirnya dia pulang nggak jadi nyanyi,” kata SBY saat membuka Kongres Alumni GMNI, di Hotel Sahid, kemarin.

Secara detail teks berita Suara Merdeka mendeskripsikan bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terganggu melihat pusar wanita. Dengan bagan berita seperti ini mengandung pesan mengenai pornografi dan pornoaksi, SBY mengajak masyarakat untuk kembali pada sifat dasar manusia yang jernih.

Dari perangkat analisis skrip, bagaimana cara wartawan mengisahkan fakta dalam bagian berita ini adalah sebagai berikut. Dari unsur-unsur berita yang terkandung dalam berita tersebut adalah: who (Presiden Susilo Bambang Yudhoyono), what (terganggu melihat pusar wanita), where (Hotel Sahid Jakarta), why (Mengenal pornografi dan pornoaksi, SBY mengajak masyarakat untuk kembali pada sifat dasar manusia yang jernih), how (Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) secara terbuka mengutarakan unek-uneknya tentang gaya hidup sebagian orang Indonesia yang dirasa mengganggu). Dalam teks berita mengisahkan pula bentuk gaya hidup saat ini, ada yang tidak saya suka, lihat pusar wanita.

Sedangkan dari analisis Tematik, yaitu bagaimana cara wartawan menulis sebuah fakta. Secara umum teks Suara Merdeka

mengisahkan presiden Susilo Bambang Yudhoyono secara terbuka menyatakan unek-uneknya tentang gaya hidup sebagian orang Indonesia yang dirasa menggangu.

Struktur retorik wartawan menekankan sebuah fakta. Struktur ini dapat dilihat melalui kata yang diucapkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, serta pengambilan sumber yang merupakan orang nomor satu di Indonesia.

Frame Suara Merdeka 27 Maret 2006

“Inneke: Banyak Artis Dukung RUU APP”

Meskipun pembahasan rancangan undang-undang anti pornografi dan pornoaksi (RUU APP) berjalan alot, ribuan aktivis Islam turun ke jalan menuntut DPR untuk segera mengesahkan menjadi undang-undang. Sementara itu, artis sinetron Inneke Koesherawati mengatakan, pihaknya mendukung pengesahan RUU APP menjadi undang-undang sesegera mungkin.

Analisis Sintaksis akan melihat frame ini. Judul yang digunakan Suara Merdeka adalah “Inneke: Banyak Artis Dukung RUU APP” judul itu mengindikasikan bahwa khayalak diajak untuk mendukung pengesahan RUU APP. Judul ini memberikan sudut pandang dari berita, di samping khayalak dibawa supaya menyetujui RUU APP menjadi undang-undang. Perangkat sintaksis lain adalah lead. Lead tersebut adalah “sejumlah pengunjung rasa menandatangani spanduk sebagai dukungan terhadap RUU APP di sekitar bundaran

HI, jakarta, minggu (26/3). Para pengunjung rasa yang terdiri atas sejumlah elemen ormas itu menuntut segera disahkannya RUU tersebut.

Dari perangkat skrip, kisah dari berita itu adalah banyaknya dukungan para artis terhadap pengesahan Undang-Undang Anti Pornografi dan Pornoaksi. Dari unsur-unsur berita yang terkandung dalam berita tersebut adalah: who (Inneke Koesherawati), what (dukungan), when (Minggu, 26 Maret 2006), where (Bundaran Hotel Indonesia), how (Inneke mengatakan banyak arti mendukung RUU APP).

Struktur retorik wartawan menekankan sebuah fakta. Struktur ini dapat dilihat melalui kata yang diucapkan oleh artis Inneke Koesherawati, dari penggunaan kalimat “Banyak”. Hal ini menjadi berita ini terkesan banyaknya kalangan artis yang mendukung RUU APP. Dengan penggunaan kata banyak tentu khalayak akan merespon betapa banyaknya dukungan RUU APP untuk disahkan terutama dari kalangan artis.

Selain itu guna penekanan terhadap sebuah fakta disini dicantumkan foto para pengunjung rasa yang sedang tanda tangan, sebagai wujud dukungan terhadap RUU APP.

Frame Suara Merdeka 27 Maret 2006

“MUI Dukung SPB Tempat Ibadah”

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan tidak puas dalam pengesahan Surat Peraturan Bersama (SPB) Pendirian Tempat Ibadah, namun tetap mendukung SPB itu karena dinilai mampu menjaga kerukunan antar umat beragama. Hal itu dikatakan Ketua MUI Ma'ruf Amin, di sela-sela aksi unjuk rasa RUU APP, Minggu (26/3) di Jakarta.

Dari analisis sintaksis, pandangan Suara Merdeka diwujudkan dalam skema atau bagan berita. Frame Suara Merdeka tersebut tertuang dalam judul berita: “MUI Dukung SPB Tempat Ibadah.”

Dari analisis skrip, berita tersebut mengisahkan mengenai dukungan terhadap RUU APP. Dari berita tersebut unsur berita yang terdapat dalam teks adalah who (Ketua MUI Ma'ruf Amin), what (dukung), ketika mengisahkan “what” Suara Merdeka mengisahkan tentang surat peraturan bersama, tetapi hal ini terkesan memberikan pandangan kepada khalayak bahwa MUI mendukung RUU APP.

Sementara itu dari struktur tematik, berita ini membawa tema besar yang ingin ditampilkan kepada khalayak, MUI dukung SPB (Surat Peraturan Bersama) tempat ibadah demi menjalin kerukunan antar umat beragama, akan tetapi hal itu disampaikan disela-sela aksi unjuk rasa RUU APP. Jadi pemberitaan tersebut terkesan MUI mendukung RUU APP.

Dari struktur retorik, bagaimana wartawan menekankan fakta pada tema, MUI mendukung SPB. Penekanan dapat disimak pada pemilihan kata atau leksikon diambil dari berita tersebut adalah “Dukung” dengan kata, “Dukung” disini mencitrakan kepada khalayak ada sikap senang terhadap RUU APP.

Frame Suara Merdeka 29 Maret 2006

“DPD Dukung RUU APP Segera Disahkan”

Panitia Adalah Hoc III (bidang agama dan pendidikan) Dewan perwakilan Daerah (DPD) RI sepakat mendukung segera disahkannya Undang-Undang Anti Pornografi dan Pornoaksi (RUU APP) yang kini sedang dibahas Panitia Khusus (Pansus) DPR.

Menurut anggota PAH III, KH. Mujib Imron, (Jatim), dukungan berupa rekomendasi itu ditegaskan dalam rapat DPD di Gedung MPR Senayan, Jakarta, Selasa kemarin.

Dari analisis sintaksis, pandangan Suara Merdeka diwujudkan dalam skema atau bagan berita. Frame Suara Merdeka tersebut tertuang dalam judul berita: “DPD Dukung RUU APP Segera Disahkan” Sudut pandang berita dari rangkaian lead itu menunjukkan bahwa banyaknya dukungan terhadap RUU APP, ini bisa diamati dari lead berita sebagai berikut:

“Apel akbar: sejumlah orang dari berbagai elemen ormas Islam se-Jatim menggelar apel akbar mendukung RUU APP di depan DPRD Jalan Pahlawan Surabaya, Selasa (28/3). Mereka meminta pemerintah untuk segera mengesahkan RUU APP menjadi undang-undang”.

Dari analisis skrip, berita tersebut mengisahkan mengenai dukungan terhadap RUU APP. Dari berita tersebut unsur berita yang terdapat dalam teks adalah who (Dewan Perwakilan Rakyat), what (Mendukung), why (segera mengesahkan RUU APP), ketika mengisahkan “why” Suara Merdeka secara jelas bahwa DPD sangat mendukung terhadap pengesahan RUU APP.

Dengan menyusun skrip seperti ini, maka yang muncul di hadapan khalayak adalah bahwa DPD sangat mendukung RUU APP dan meminta segera disahkan.

Sementara itu dari struktur tematik, berita ini membawa tema besar yang ingin ditampilkan kepada khalayak, pertama; DPD RI sepakat mendukung segera disahkannya RUU APP yang kini sedang dibahas Panitia Khusus (Pansus) DPR.

Tema kedua; Berpihak, Ketua Umum PBNU KH. Hasyim Muzadi mendesak DPR dan pemerintah segera menyelesaikan RUU APP. Kedua tema diatas secara detail dan panjang lebar Suara Merdeka menghadirkan fakta-fakta yang ada di lapangan.

Dari struktur retorik, bagaimana wartawan menekankan fakta pada tema pertama, DPD mendukung RUU APP segera disahkan. Penekanan dapat disimak pada pemilihan kata atau leksikon diambil dari berita tersebut adalah “Dukung” dengan. kata, “Dukung” disini mencitrakan kepada khalayak ada sikap senang terhadap RUU APP. Selain itu dalam penekanan berita disini juga dimuat foto sejumlah

orang dari berbagai elemen ormas Islam se-Jatim menggelar apel akbar sambil membawa poster berisi dukungan terhadap RUU APP.

Frame Suara Merdeka 1 April 2006

“Demo Tolak RUU APP “Disuguih” Pemandangan Syur”

Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Koalisi Anti-Pornografi dan Pornoaksi menggelar unjuk rasa di Jalan Pahlawan Semarang. Pemandangan kontras terlihat menjelang 100-an mahasiswa di Kota Semarang mengakhiri unjuk rasa menolak pornografi dan pornoaksi di bundaran air muncrat Jalan Pahlawan, Jumat (31/3).

Frame Suara Merdeka bila dianalisis sintaksis, Suara Merdeka menurunkan berita dengan judul “Demo Tolak RUU APP “Disuguih” Pemandangan Syur” judul ini mengandung tingkat kemenonjolan yang tinggi. Menunjukkan kecenderungan berita, perangkat sintaksis yang lain berupa lead yang dipilih yaitu:

“Pemandangan kontras terlihat menjelang 100-an mahasiswa di Kota Semarang mengakhiri unjuk rasa menolak pornografi dan pornoaksi di bundaran air muncrat Jalan Pahlawan, Jumat (31/3). Ketika peserta aksi satu per satu beranjak membubarkan diri, mendadak muncul seorang perempuan dengan berpakaian syur dari dalam mobil sedan. Perempuan itu mendatangi rombongan rokok di trotoar mulut Jalan Imam Barjo sebelah utara”.

Berita itu juga memakai latar. Latar yang dipakai berupa informasi suasana disekitar tempat aksi. Ketika peserta aksi satu per satu beranjak membubarkan diri, mendadak muncul seorang perempuan dengan berpakaian syur dari dalam mobil sedan.

Perempuan itu mendatangi rombongan rokok di trotoar mulut Jalan Imam Barjo sebelah utara. Dia mengenakan celana pendek ketat dan kaus lengan pendek ketat pula sehingga bagian tubuh yang seharusnya tertutup menarik perhatian banyak orang. “Eh, itu porno, porno!” teriak beberapa pekerja bengkel motor yang duduk di trotoar sisi selatan Jalan Imam Barjo.

Dari sudut tematik yaitu mengenai bagaimana cara wartawan menulis suatu fakta. tema yang mendukung gagasan Suara Merdeka dalam berita tersebut. Pertama, demo penolakan terhadap pornografi dan pornoaksi, Terlepas dari pemandangan sekilas itu, pengunjung rasa yang tergabung dalam Koalisi Anti-Pornografi dan Pornoaksi (KAPP) tidak terusik hingga aksi selesai. Mereka mendesak pemerintah dan DPR segera mengesahkan rancangan undang-undang anti-pornografi dan pornoaksi (RUU APP) menjadi undang-undang.

Struktur skrip akan melihat bagaimana wartawan mengisahkan fakta dalam berita secara keseluruhan. Berita ini mengisahkan tentang dukungan terhadap RUU APP untuk segera dijadikan undang-undang, sehingga banyak kalangan digambarkan mendukung.

Struktur tematik, bagaimana cara wartawan menulis sebuah fakta. Struktur ini dapat dilihat dari penggunaan kalimat “disuguhi”. Kata disuguhi ini menjadikan khalayak untuk lebih mencermati isi dari berita tersebut.

Struktur retorik, dalam penekanan sebuah fakta dapat diamati melalui gambar. Disini dimuat gambar mahasiswa sedang melakukan aksi unjuk rasa menentang pornografi dan pornoaksi.

Frame Suara Merdeka 9 April 2006

“Kiai NU Berkumpul di Rembang Bahas Percepatan Pembangunan Pedesaan”

Kurang lebih 100 kiai NU se-Jateng kemarin berkumpul di Rembang, tepatnya di Pondok Pesantren (Ponpes) Raudlatuth Thalibin, Leteh. Pengasuh ponpes itu, KH A Mustofa Bisri (Gus Mus) selaku tuan rumah menyatakan bahwa dalam pertemuan kiai-kiai itu tidak membahas konflik yang terjadi dalam tubuh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Pertemuan yang digagasnya tersebut lebih untuk menyatukan rasa antara kiai-kiai yang berbasis NU.

Frame Suara Merdeka menyusun fakta untuk disusun ke dalam teks berita, analisis sintaksis. Judul yang digunakan Suara Merdeka adalah “Kiai NU Berkumpul di Rembang Bahas Percepatan Pembangunan Pedesaan.” Perangkat sintaksis yang digunakan suara merdeka adalah lead. Lead tersebut adalah:

“Kiai NU se-Jawa Tengah, Sabtu kemarin, berkumpul di Ponpes Raudlatuth Thalibin, Leteh, Rembang untuk membahas sejumlah permasalahan bangsa.”

Perangkat sintaksis yang lain adalah pernyataan untuk mendukung gagasan yang digunakan berupa pernyataan dari Gus Mus yang dimuat dalam Suara Merdeka sebagai berikut:

“Mengenai RUU APP sendiri, menurut Gus Mus, sempat dilontarkan oleh beberapa peserta, namun tidak sampai dibahas. Artinya, tidak ada statemen untuk menolak ataupun mendukung RUU tersebut.”

Dalam frame Suara Merdeka mengisahkan peristiwa pemberitaan tersebut (skrip). Berita ini mengisahkan bahwa frame dari tema tersebut adalah who (Kyai NU), when (Sabtu, 8 April 2006), where (Rembang), what (bahas percepatan pembangunan pedesaan).

Dari sudut tematik, ada beberapa tema yang mendukung gagasan Suara Merdeka dalam tema tersebut adalah para kyai NU berkumpul untuk membahas percepatan pembangunan pedesaan, di sisi lain dalam pemberitaan tersebut Suara Merdeka menuangkan pernyataan dari tokoh NU yaitu KH. Mustofa Bisri yang sempat terlontar di forum tersebut, meski tidak ada reaksi dari para kyai NU untuk mendukung atau menolak. Hal tersebut cukup dapat direspon oleh khalayak bahwa para kyai NU terkesan mendukung RUU APP.

Dari struktur retorik, bagaimana wartawan menekankan fakta. Di sini fakta ditekankan dengan pemuatan foto para tokoh Kyai NU yang sedang berkumpul di Rembang.

Frame Suara Merdeka 24 April 2006

“Rakor PBB Desak Pengundangan RUU APP”

Rakor Majelis Syuro Partai Bulan Bintang (PBB) mendesak pemerintah dan DPR segera mengundang rencana undang-undang anti pornografi dan pornografi (RUU APP). Tujuannya, untuk

mengayomi dan melindungi masyarakat terutama generasi muda dan anak-anak dari kerusakan moral.

Frame Suara Merdeka menyusun fakta untuk disusun ke dalam teks berita, analisis sintaksis. Judul yang digunakan Suara Merdeka adalah “Rakor PBB Desak Pengundangan RUU APP”. Perangkat sintaksis yang lain adalah pernyataan untuk mendukung gagasan yang digunakan berupa pernyataan dari wakil sekretaris Majelis Syuro PBB Bambang Setyo sebagai berikut:

“Rakor juga mendesak aparat hukum dan ketertiban masyarakat agar lebih proaktif menindak produsen dan mengedar pornografi serta menindak pelakunya”.

Dalam frame Suara Merdeka mengisahkan peristiwa pemberitaan tersebut (skrip). Berita ini mengisahkan bahwa frame dari tema “Rakor PBB Desak Pengundangan RUU APP” adalah who (Majelis Syuro Partai PBB), when (Minggu, 23 April 2006), where (Jakarta), what (desak pengundangan RUU APP), why (RUU APP untuk mengayomi dan melindungi masyarakat terutama generasi muda dan anak-anak dari kerusakan moral). Unsur berita how (Majelis Syuro Partai Bulan Bintang mendesak pemerintah dan DPR segera mengundangkan Rancangan Undang-Undang Anti Pornografi dan Pronoaksi).

Dari sudut tematik, ada beberapa tema yang mendukung gagasan Suara Merdeka dalam tema “Rakor PBB Desak Pengundangan RUU APP” adalah Majelis Syuro Partai Bulan Bintang

mendesak pemerintah dan DPR segera mengundang Rancangan Undang-Undang Anti Pornografi dan Pronoaksi. Sesuai dengan salah satu butir yang dibacakan wakil sekretaris Majelis Syuro PBB Bambang Setyo di Jakarta.

Dari struktur retorik, bagaimana wartawan menekankan fakta. Di sini fakta ditekankan dengan kata “esak”. Memberi pemahaman kepada khalayak agar mendukung pengundangan RUU APP.

Frame Suara Merdeka 24 April 2006

“Tolak Play Boy, Desak Pengesahan RUU APP”

Ikatan Cendekiawan Muslim Se-Indonesia (ICMI) secara tegas menolak kehadiran Majalah *Playboy*, demikian salah satu butir rekomendasi Rapat Majelis Pimpinan Paripurna ICMI yang digelar di Jakarta pada 21-23 April 2006.

“ICMI menolak tegas Majalah Playboy karena majalah-majalah yang sejenis dengan itu dapat merusak moral bangsa,”kata Hatta Radjasa, Presidium Majelis Pengurus Pusat ICMI periode 2005-2010, dalam jumpa pers se usai penutupan rapat majelis. Selain itu, ICMI juga berpendapat, perlu ada upaya reorientasi kebijakan pembangunan ekonomi negara agar lebih menjamin keterwujudan kemandirian dan kesejahteraan bangsa.

Dari analisis sintaksis, bagaimana cara wartawan menyusun fakta yang akan menimbulkan makna tertentu ketika diterima oleh khalayak. Judul yang dipakai oleh Suara Merdeka adalah “Tolak Play

Boy, Desak Pengesahan RUU APP”. Teks berita ini akan menunjukkan dengan tingkat kemenonjolan yang tinggi. Perangkat sintaksis lain adalah berupa latar. Latar ini berupa kutipan rekomendasi ICMI.

Dari perangkat analisis skrip, bagaimana cara wartawan mengisahkan fakta dalam bagian berita ini adalah sebagai berikut. who (ICMI), what (Tolak Play Boy, Desak Pengesahan RUU APP), where (Jakarta), why (karena majalah-majalah yang sejenis itu dapat merusak moral bangsa), how (ICMI secara tegas mengatakan agar segera diundangkan Rancangan Undang-Undang Anti Pornografi dan Pornoaksi (RUU APP). Dalam teks berita perlu adanya kemampuan untuk menghidupkan semangat kemandirian secara sungguh-sungguh dengan memperkuat ekonomi rakyat sehingga tercipta sistem ekonomi yang berkeadilan.

Dari pandangan Suara Merdeka sendiri terdiri atas dua tema, pertama Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia yang secara tegas menolak kehadiran Majalah *Playboy*.

Tema kedua, ICMI secara tegas mengatakan agar segera diundangkan rancangan undang-undang Anti Pornografi dan Pornoaksi (RUU APP) dengan tetap memperhatikan keragaman budaya yang berlaku di Indonesia, tema ini memakai elemen maksud, ini dapat di lihat pada informasi yang diuraikan secara tersamar,

implisit dan tersembunyi. Tujuan akhir adalah publik disajikan informasi yang menguntungkan komunikator.

Frame Suara Merdeka ditekankan pula melalui penekanan pada elemen grafis. Elemen itu muncul dalam bentuk pengambilan sumber yaitu ICMI untuk mendukung gagasan yang ingin ditonjolkan kepada khalayak.

Frame Suara Merdeka 26 April 2006

“Mendukung Polisi”

Bagi Putu Wijaya, seorang aktor teater sekaligus pimpinan Teater Mandiri, keberadaan RUU APP adalah ancaman bagi kebhinekaan dan Pancasila yang terkenal dengan berbeda-beda tetapi satu itu. “*Wah*, kalau itu disahkan sama saja menyeragamkan berbagai perbedaan yang ada,” ujarnya. Keberadaan RUU APP tersebut, sama saja negara tiba-tiba mencampuri kehidupan pribadi manusianya. “Pluralisme akan jadi seragam, dan itu tujuan mereka yang ingin RUU APP tersebut disahkan.” Menurut Putu, perbedaan itu baik dan harus dihormati, sehingga tidak perlu diseragamkan, sebab akan kehilangan jati diri. Soal penerbitan Majalah *Playboy*, dia mendukung langkah Polda Metro Jaya yang sudah melarang beredar di Jakarta.

Analisis Sintaksis akan melihat frame ini. Judul yang digunakan Suara Merdeka adalah “Mendukung Polisi” judul itu mengindikasikan bahwa khayalak diajak untuk setuju atas langkah

yang diambil oleh Polda Metro Jaya yang sudah melarang beredar majalah *Play Boy* beredar di Jakarta.

Dari perangkat skrip, kisah dari berita itu adalah dukungan Putu Wijaya kepada Polda Metro Jaya mengalir untuk memberantas peredaran majalah porno. Dari unsur-unsur berita yang terkandung dalam berita tersebut adalah: who (Putu Wijaya), what (mendukung), when (26 April), how (keberadaan RUU APP adalah ancaman bagi kebhinekaan dan Pancasila yang terkenal dengan berbeda-beda tetapi satu), where (Jakarta).

Dari pandangan Suara Merdeka sendiri terdiri atas dua tema. Pertama, sikap penolakan RUU APP oleh Putu Wijaya karena keberadaan RUU APP adalah ancaman bagi kebhinekaan dan pancasila yang terkenal dengan berbeda-beda tetapi satu. Kalau disahkan sama saja menyeragamkan berbagai pendapat yang ada.

Tema kedua, dukungan Putu Wijaya kepada pihak Polda Metro Jaya terhadap upaya melarang peredaran majalah *playboy* di Jakarta. Menurut putu, perbedaan itu baik dan harus dihormati, sehingga tidak perlu diseragamkan, sebab akan kehilangan jati diri.

Struktur retorik dari pemberitaan Suara Merdeka, disini dimuat foto Putu Wijaya seorang aktor teater dan sekaligus sebagai ikon dari seniman di Indonesia.

Frame Suara Merdeka 27 April 2006

“Inul Terancam Diusir Gara-gara Tolak RUU Anti Pornografi”

“Forum Betawi Rempug (FBR) mengecam keras keikutsertaan Inul Daratista dalam aksi menentang Rancangan Undang-Undang Anti Pornografi dan Pornoaksi.”

Frame Suara Merdeka bila dianalisis sintaksis, Suara Merdeka menurunkan berita dengan judul “Inul Terancam Diusir Gara-gara Tolak RUU Anti Pornografi” judul ini mengandung tingkat kemenonjolan yang tinggi. Menunjukkan kecenderungan berita, perangkat sintaksis yang lain berupa lead yang dipilih yaitu “Inul “ngebor” Semarang, beberapa waktu lalu.”

Berita itu juga memakai latar. Latar yang dipakai berupa informasi ancaman FBR sebagai berikut: Jika Inul tak mau meminta maaf, mereka mengancam menutup bisnis karaokenya dan mengusir sang penyanyi itu dari Jakarta. Rabu, 26 April, kami bikin pernyataan. Intinya, sikap ngotot Inul menyakitkan hati FBR. Karena itu dia harus diusir dari Jakarta.

Struktur skrip akan melihat bagaimana wartawan mengisahkan fakta. Dari berita tersebut unsur berita yang terdapat dalam teks adalah who (Inul Daratista) what (Terancam Diusir), when (Rabu, 26 April 2006), where (Jakarta), why (gara-gara tolak RUU APP). Semua unsur berita telah terdapat dalam berita itu dengan lengkapnya unsur berita yang disajikan, khalayak akan menafsirkan bahwa menurut FBR sikap perempuan asal Pasuruan, Jawa Timur, itu membuat FBR

terluka. Merasa sebagai “pemilik kampung” betawi, farum itu ingin mengusir sang ratu ngebor dari rumahnya di Pondok Indah. Jakarta, mereka juga mengancam menutup bisnis karaoke Inul.

Struktur tematik, bagaimana cara wartawan menulis sebuah fakta. Struktur ini dapat dilihat dari penggunaan kalimat “terancam”. Kata terancam ini menjadikan khalayak untuk lebih mencermati isi dari berita tersebut.

Struktur retorik, dalam penekanan sebuah fakta dapat diamati melalui foto. Disini dimuat foto Inul “ngebor” di Semarang.

4.1.2. Analisis Framing Terhadap Pemberitaan Surat Kabar Suara Merdeka Kategori Kontra Terhadap Rancangan Undang-Undang Anti Pornografi dan Pornoaksi

Frame Suara Merdeka 09 Maret 2006

“Gubernur Diminta Bubarkan TBS Bila RUU APP Nekat Disahkan”

Keluarga besar lembaga Taman Budaya Jawa Tengah di Surakarta (TBS) bersama komunitas-komunitas kesenian yang dinaunginya, berharap agar Gubernur Jateng membubarkan lembaga pamong seni budaya itu apabila RUU Anti Pornoaksi dan Pornografi (APP) nekat disahkan.

Dari analisis sintaksis, pandangan Suara Merdeka diwujudkan dalam skema atau bagan berita. Frame Suara Merdeka tersebut tertuang dalam judul berita: “Gubernur Diminta Bubarkan TBS Bila

RUU APP Nekat Disahkan” lead atau kepala berita yang dipakai Suara Merdeka juga memperlihatkan frame Suara Merdeka “Keluarga besar lembaga Taman Budaya Jawa Tengah di Surakarta (TBS) bersama komunitas-komunitas kesenian yang dinaunginya, berharap agar Gubernur Jateng membubarkan lembaga pamong seni budaya itu apabila RUU Anti Pornoaksi dan Pornografi (APP) nekat disahkan.”

Dari analisis skrip, berita tersebut mengisahkan adalah who (Keluarga Besar Lembaga Taman Budaya Jawa Tengah), what (berharap agar Gubernur Jateng membubarkan lembaga pamong seni budaya), why (apabila RUU APP nekat disahkan), ketika mengisahkan “why” Suara Merdeka secara jelas menjelaskan Menurut Kepala TBS itu, para penyusun RUU itu salah mengartikan pornoaksi dan pornografi. Terlebih lagi, mereka itu telah mengingkari atau bahkan tidak melihat adanya realitas perbedaan di masyarakat. Bagi kalangan masyarakat seni budaya di Surakarta, pasal-pasal dalam RUU yang mempersoalkan perihal pornoaksi dan pornografi dalam kehidupan di masyarakat, utamanya yang dilansir berbagai media, dinilai terlalu sembrono dan serampangan.

Sementara itu dari struktur tematik, berita ini membawa tema besar yang ingin ditampilkan kepada khalayak, Ancaman yang nyata jika benar-benar disahkan menjadi undang-undang adalah bentuk pemberangusan kreativitas berkesenian. Efek yang ditimbulkan tidak hanya matinya aktivitas-aktivitas seni-budaya secara luas, tetapi

berimbas juga pada kegiatan perekonomian. Misalnya di bidang industri multimedia, jenis-jenis produk yang selama ini mensponsori dan segala aktivitas pendukungnya seperti bidang periklanan.

Frame Suara Merdeka 10 Maret 2006

“UU APP Tak Tampung Aspirasi Budaya Etnik”

Keberadaan Rancangan Undang-Undang Anti-Pornografi dan Pornoaksi (RUU APP) memunculkan tanggapan kritis dari berbagai pihak. Praktisi hukum M Assegaf menilai RUU itu masih terlalu mendua untuk dijadikan sebuah undang-undang, karena tidak menampung aspirasi budaya etnik.

Analisis sintaksis, pandangan Suara Merdeka ditunjukkan pada lead atau kepala berita, lead atau kepala berita yang dipakai Suara Merdeka juga memperlihatkan frame Suara Merdeka “RUU APP Tak Tampung Aspirasi Budaya Etnik”. Sudut pandang berita dari pernyataan M. Assegaf sebagai berikut:

“Kontroversi penolakan terhadap RUU tersebut semakin marak, dikarenakan di dalam penyusunannya tidak mencantumkan aspirasi dari masyarakat etnik. Saya pikir, reaksi kontroversi itu timbul karena tidak dicantumkannya aspirasi dari masyarakat etnik.”

Sedang analisis skrip, sehubungan bagaimana Suara Merdeka sebuah fakta what (Keberadaan RUU APP), why (RUU APP memunculkan tanggapan kritis dari berbagai pihak).

Kemudian struktur tematik dari pemberitaan Suara Merdeka yang berjudul “RUU APP Tak Tampung Aspirasi Budaya Etnik”

Suara Merdeka secara jelas menjelaskan beberapa pernyataan dari berbagai sumber diantaranya praktisi hukum M. Assegaf, Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshidiqqie dan Ketua Umum PBNU, KH. Hasyim Muzadi.

Dari struktur retorik, bagaimana wartawan menekankan fakta pada tema “ RUU APP Tak Tampung Aspirasi Budaya Etnik “. Penekanan dapat disimak pada pemilihan kata atau leksikon diambil dari berita tersebut adalah “Tak Tampung” terhadap RUU APP. Terminologi, “Tak Tampung” disini mencitrakan kepada khalayak tidak adanya aspirasi masyarakat dalam RUU APP.

Frame Suara Merdeka 20 Maret 2006

“FPDI-P Ajukan Lima Paradigma”

Berdasarkan kesepakatan rapat Pansus DPR RI dalam konsinyering, tiga bab dalam Rancangan Undang-Undang Anti Pornografi dan Pornoaksi (RUU APP) yang kini dibahas, akhirnya didrop. Bab satu yang berkaitan dengan tindak pidana pornografi dititipkan pada amandemen KUHP. Bab dua tentang badan pengawas pornografi diserahkan pada aparat hukum seperti polisi dan kejaksaan.

Frame Suara Merdeka bila dianalisis sintaksis, Suara Merdeka menurunkan berita dengan judul “FPDI-P Ajukan Lima Paradigma” judul ini mengandung tingkat kemenonjolan yang tinggi.

Berita itu juga memakai latar. Latar yang dipakai berupa pernyataan dari anggota Pansus RUU APP, Eva K Sundari sebagai berikut:

"Perubahan draf RUU APP dengan mengedrop beberapa bab itu lebih kelihatan waras dan masuk akal. Sejak awal penyusunan RUU APP tidak menggunakan dasar UU No 4/2004 tentang Sistematika Pembuatan Perundang-undangan, sehingga kacau-balau," tambah anggota FPDI-P itu.

Struktur skrip akan melihat bagaimana wartawan mengisahkan fakta. Dari berita tersebut unsur berita yang terdapat dalam teks adalah who (FPDI-P) what (Ajukan lima paradigma), when (Sabtu, 18 Maret 2006), where (Solo), why (Perubahan draf RUU APP dengan mengedrop beberapa bab itu lebih kelihatan waras dan masuk akal. Sejak awal penyusunan RUU APP tidak menggunakan dasar UU No 4/2004 tentang Sistematika Pembuatan Perundang-undangan). Semua unsur berita telah terdapat dalam berita itu dengan lengkapnya unsur berita yang disajikan khalayak.

Struktur retorik, bagaimana cara wartawan menulis sebuah fakta. Struktur ini dapat dilihat dari penggunaan kalimat "paradigma". Kata paradigma ini menjadikan khalayak untuk lebih mencermati isi dari berita tersebut.

Frame Suara Merdeka 20 Maret 2006

"Pansus Akomodasi Penolakan RUU APP"

Gelombang penolakan masyarakat di berbagai wilayah pada rancangan Undang-Undang Anti Pornografi dan Pornoaksi (RUU

APP), agaknya mendapat perhatian serius dari DPR. Panitia Khusus (Pansus) yang membahas RUU tersebut dilaporkan telah mengakomodasi aspirasi yang berkembang.

Frame Suara Merdeka menyusun fakta untuk disusun ke dalam teks berita, analisis sintaksis. Judul yang digunakan Suara Merdeka adalah “Pansus Akomodasi Penolakan RUU APP.” Perangkat sintaksis yang lain adalah latar untuk mendukung gagasannya. Latar yang digunakan berupa mengakomodasikan aspirasi berbagai kalangan yang menolak.

Hal ini ditunjukkan dengan pernyataan ketua DPR Agung Laksono sebagai berikut:

“Masyarakat yang menolak, saya meminta, dalam menyampaikan aspirasi hendaknya sesuai dengan koridor hukum dan tidak berlebihan. Saya yakin, Pansus berusaha mengakomodasi semua aspirasi masyarakat yang berkembang.”

Dalam frame Suara Merdeka mengisahkan peristiwa pemberitaan tersebut (skrip). Berita ini mengisahkan bahwa frame dari tema “Pansus Akomodasi Penolakan RUU APP” adalah who (Agung Laksono), when (19 Maret 2006), where (di Jakarta), what (pengakomodasian aspirasi penolak RUU APP), why (RUU dinilai tidak menampung aspirasi masyarakat). Unsur berita how (Agung Laksono meminta pansus untuk mengakomodasikan aspirasi dai berbagai kalangan yang menolak RUU APP).

Dari sudut tematik, ada beberapa tema yang mendukung gagasan Suara Merdeka dalam tema “Pansus Akomodasi Penolakan RUU APP” berita tersebut diwarnai dua tema, tema pertama terkait dengan pernyataan ketua DPR Agung Laksono, tentang pengakomodasian aspirasi kalangan yang menolak RUU APP. Sedangkan tema kedua bentuk akomodasi. Ketua pansus RUU APP Balkan Kaplale mengatakan, penghilangan kata “anti” dalam judul RUU adalah salah satu bentuk akomodasi terhadap masyarakat yang menolak.

Dari struktur retorik, bagaimana wartawan menekankan fakta. Di sini fakta tidak ditekankan dengan foto.

Frame Suara Merdeka 5 April 2006

“RUU APP Lebih Banyak Menjerat Korban”

RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi (APP) yang kini jadi pro-kontra di masyarakat, menurut penilaian pakar multimedia KRMT Roy Suryo Notodiprojo, memiliki kesalahan prinsip, yaitu menafikan ruang dan waktu.

Frame Suara Merdeka, juga bisa diperhatikan dari bagaimana wartawan menyusun fakta (sintaksis) untuk disusun ke dalam latar berita. Latar yang digunakan Suara Merdeka adalah pembicaraan pakar multimedia Roy Suryo. Berita itu merupakan tingkat kecenderungan berita, pembaca cenderung lebih mengingat pembicaraan tersebut.

Dari berita tersebut unsur berita yang terdapat dalam teks adalah what (RUU APP), when (Rabu, 5 April Desember 2006), where (Solo), why (banyak menjerat korban). Semua unsur berita telah terdapat dalam berita itu dengan lengkapnya unsur berita yang disajikan, khalayak akan menafsirkan bahwa menurut Roy Suryo RUU APP tersebut berisi aturan-aturan yang sudah ada dalam undang-undang lainnya, contohnya aturan pornografi pada KUHP.

Fokusnya lebih banyak pada korban, bukan pelaku dan industrinya. Misalnya gambar-gambar porno yang secara tak sengaja tersebar melalui telepon seluler, berdasarkan RUU itu justru korbannya yang terjaring.

“RUU itu lebih banyak menjerat korban. Jika dikatakan harus direvisi total, iya. Meski saya setuju ada UU APP, jangan memaksakan undang-undang yang ada kesalahan-kesalahan prinsipial,”.

Sementara itu dari struktur tematik, berita itu membawa tema besar yang ingin ditampilkan kepada khalayak. Tema itu adalah, “RUU APP Lebih Banyak Menjerat Korban.” Tema ini, disusun secara detail yang lengkap dan panjang lebar merupakan penonjolan yang dilakukan secara sengaja untuk menciptakan citra tertentu kepada khalayak.

Frame Suara Merdeka juga dapat dilihat dalam struktur retorik. Aspek retorik tertentu untuk menekan makna yang ingin disampaikan kepada masyarakat umum kata-kata “Menjerat” merupakan pilihan

kata yang digunakan dan mendapat penekanan dari sekian banyak pilihan yang ada. Dalam aspek grafis, frame Suara Merdeka menampilkan foto pakar multimedia Roy Suryo tampil dalam seminar membahas masalah pornografi dan pornoaksi dalam multimedia.

Frame Suara Merdeka 22 April 2006

“Aktivis Perempuan Tolak RUU APP”

Memperingati hari Kartini (21/4), belasan aktivis yang tergabung dalam Front Perempuan Indonesia (FPI) melakukan aksi ke jalan. Mereka menyerukan penolakan terhadap Rancangan Undang-Undang Anti Pornografi dan Pornoaksi (RUU APP) yang dinilai diskriminatif terhadap sebagian anak dan perempuan.

Analisis Sintaksis akan melihat frame ini. Judul yang digunakan Suara Merdeka adalah “Aktivis Perempuan Tolak RUU APP” judul itu mengindikasikan bahwa khayalak diajak untuk menolak RUU APP. Sedangkan lead yang digunakan adalah “belasan aktivis front perempuan Indonesia (FPI) menggelar aksi penolakan RUU APP. Mereka mendatangi gedung DPRD Jateng di Jl. Pahlawan, Semarang.” Lead ini memberikan sudut pandang dari berita, di samping khayalak dibawa supaya menolak RUU APP. Perangkat sintaksis lain adalah latar. Latar tersebut adalah alasan penolakan, RUU APP tidak memberi solusi terhadap peredaran dan akses media atas pornografi sehingga upaya pencegahan kekerasan sebagai dampak tayangan media tersebut tidak akan tercapai.

Dari perangkat skrip, kisah dari berita itu adalah penolakan Front Perempuan Indonesia (FPI) terhadap RUU APP. Dari unsur-unsur berita yang terkandung dalam berita tersebut adalah: who (FPI), what (tolak), when (21 April 2006), how (RUU APP tidak memberi solusi), where (Semarang).

Dari pandangan Suara Merdeka sendiri terdiri atas dua tema. Pertama, penolakan FPI terhadap RUU APP beralasan bahwa RUU tersebut tidak memberi solusi terhadap peredaran dan akses media atas pornografi sehingga upaya pencegahan kekerasan sebagai dampak tayangan media tersebut tidak tercapai.

Tema kedua, pornografi dan pornoaksi adalah komoditas kapitalis yang menjadikan tubuh perempuan dan anak sebagai objek penghasil keuntungan. Untuk itu, kapitalis lawan sejati yang harus dihancurkan.

Struktur retorik dari pemberitaan Suara Merdeka, disini dimuat foto FPI yang sedang menggelar aksi penolakan RUU APP.

Frame Suara Merdeka 28 April 2006

“Bela Inul Daratista”

Mantan presiden ke-4 RI KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang membela penyanyi si “goyang ngebor” Inul Daratista. Inul mendapat tekanan dari Forum Betawi Rempug (FBR) yang mengancam akan mengusir Inul dari Jakarta karena menolak

Rancangan Undang-undang Anti Pornografi dan Pornoaksi (RUU APP).

Dari analisis sintaksis, bagaimana cara wartawan menyusun fakta yang akan menimbulkan makna tertentu ketika diterima oleh khalayak. Judul yang dipakai oleh Suara Merdeka adalah: “Bela Inul Daratista.” Teks berita ini akan menunjukkan dengan tingkat kemenonjolan yang tinggi. Perangkat sintaksis lain adalah berupa latar. Latar ini berupa kutipan dari pernyataan mantan Presiden RI KH. Abdurrahman Wahid (Gusdur) sebagai berikut:

“*Emangnya* ini negara apa main kuat-kuatan begitu. Ini negara hukum. Polisi harus menghentikan kelakuan preman kayak gitu,”

Secara detail teks berita Suara Merdeka mendeskripsikan bahwa mantan presiden ke-Presiden KH. Abdurrahman Wahid sangat menyayangkan aksi yang dilakukan oleh Forum Betawi Rempug (FBR) yang mengancam akan mengusir Inul dari Jakarta karena menolak RUU APP.

Dari perangkat analisis skrip, bagaimana cara wartawan mengisahkan fakta dalam bagian berita ini adalah sebagai berikut. Dari unsur-unsur berita yang terkandung dalam berita tersebut adalah: who (KH. Abdurrahman Wahid), what (bela Inul), where (Jakarta), why (FBR mengancam mengusir Inul), how (Inul Daratista. Inul mendapat tekanan dari Forum Betawi Rempug (FBR) yang mengancam akan mengusir Inul dari Jakarta karena menolak

Rancangan Undang-undang Anti Pornografi dan Pornoaksi (RUU APP).

Sedangkan dari analisis tematik, yaitu bagaimana cara wartawan menulis sebuah fakta. Secara umum teks Suara Merdeka mengisahkan mantan presiden RI ke-4 (Gusdur), secara terbuka menyatakan pembelaan terhadap penyanyi Inul Daratista yang mendapat tekanan dari FBR yang mengancam akan mengusir Inul dari Jakarta terkait penolakannya terhadap RUU APP.

Dalam hal retorik, yaitu cara wartawan menekankan fakta. Dalam teks berita yang menekankan pada foto Gusdur melalui foto itu merupakan mantan presiden RI.

Secara keseluruhan dari 24 pemberitaan tersebut di atas dapat dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu berita yang pro dan kontra. Yang kesemuanya ini dapat dikelompokkan penulis dalam tabel di bawah ini:

TABEL II
PEMBERITAAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG ANTI
PORNOGRAFI DAN PORNOAKSI SURAT KABAR SUARA
MERDEKA BULAN MARET-APRIL 2006 (PRO)

NO	TANGGAL	JUDUL PEMBERITAAN
1	6 Maret 2006	Batas Akhir Masukan Masyarakat Soal RUU APP 9 Maret
2	7 Maret 2006	Pro kontra RUU APP Dikhawatirkan, Penari Telanjang Beralasan Kesenian
3	13 Maret 2006	11 Pasal RUU APP Dihapus Termasuk Pasal Ciuman dan Pakaian.
4	19 Maret 2006	Penolak Belum Baca Draf RUU APP

5	20 Maret 2006	Hasyim: Perlu Segera Disahkan
6	23 Maret 2006	Pansus RUU APP Dilanda Konflik
7	24 Maret 2006	Baleg Bantah Tudingan RUU APP Misterius
8	25 Maret 2006	SBY: Saya Terganggu Lihat Puser Wanita
9	27 Maret 2006	Inneke: Banyak Artis Dukung RUU APP
10	27 Maret 2006	MUI Dukung SPB Tempat Ibadah
11	29 Maret 2006	DPD Dukung RUU APP Segera Disahkan
12	1 April 2006	Demo Tolak RUU APP “Disuguhi” Pemandangan Syur
13	9 April 2006	Kiai NU Berkumpul di Rembang Bahas Percepatan Pembangunan Pedesaan
14	24 April 2006	Rakor PBB Desak Pengundangan RUU APP
15	24 April 2006	Tolak Playboy, Desak Pengesahan RUU APP
16	26 April 2006	Mendukung Polisi
17	27 April 2006	Inul Terancam Diusir Gara-Gara Tolak RUU Anti Pornografi

TABEL III
PEMBERITAAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG ANTI
PORNOGRAFI DAN PORNOAKSI SURAT KABAR SUARA
MERDEKA BULAN MARET-APRIL 2006 (KONTRA)

NO	TANGGAL	JUDUL PEMBERITAAN
1	9 Maret 2006	Gubernur Diminta Bubarkan TBS Bila RUU APP Nekat Disahkan
2	10 Maret 2006	RUU APP Tak Tampung Aspirasi Budaya Etnik
3	20 Maret 2006	FPDI-P Ajukan Lima Paradigma
4	20 Maret 2006	Pansus Akomodasi Penolakan RUU APP
5	5 April 2006	RUU APP Lebih Banyak Menjerat Korban
6	22 April 2006	Aktivis Perempuan Tolak RUU APP
7	28 April 2006	Bela Inul Daratista

4.2. Pemberitaan Suara Merdeka Tentang RUU APP dilihat dari Perspektif

Dakwah

Suara Merdeka sebagai salah satu koran tertua di Indonesia koran ini dirintis oleh H. Hetami pada 11 Pebruari 1950 mendefinisikan sebagai pers umum. Dalam pemberitaanya motto suara merdeka yaitu independen, obyektif tanpa prasangka. Independen artinya mempunyai sikap bebas, mengikuti apa yang diyakini sendiri sebagai sesuatu yang harus dikemukakan demi kepentingan umum. Obyektif artinya bahwa dalam mengemukakan pendapat itu kepentingan sendiri tidak boleh ditonjolkan. Sedang maksud tanpa prasangka, dalam mengemukakan isi tulisan tidak dipengaruhi oleh buruk sangka ataupun sebaliknya.

Dengan motto yang disebutkan di atas, juga dapat di lihat dari visi dan misi yang diembannya. Misi yaitu memperdengarkan suara rakyat, menampung aspirasi rakyat dan suara hati nurani rakyat. Selain itu membuka lapangan pekerjaan dan berperan serta dalam pembangunan. Sedangkan visinya menjadikan sumber informasi demi kemajuan bangsa dan memberi nikmat kepada pengasuh serta manfaat bagi masyarakat. Motto ini sejak tahun 2004 tidak lagi dicantumkan. Motto yang dipakai sekarang adalah “Perekat Komunitas di Jawa Tengah”. Meskipun tidak lagi dipakai motto tersebut bukan berarti hilang begitu saja. Motto tersebut tetap melekat di benak dan hati sanubari semua karyawan Suara Merdeka Group.

Dalam menyikapi pemberitaan Rancangan Undang-Undang Anti Pornografi dan Pornoaksi, sepertinya tak dapat dibatasi. Seyogyanya RUU

APP sebagai instrumen untuk mengeliminasi fenomena pornografi dan pornoaksi dapat menjadi model yang merepresentasikan realitas di masyarakat, bukan sebaliknya menyeragamkan keanegaraman yang ada pada pola pandang, pemikiran, dan perilaku seluruh masyarakat.

Dalam pandangan Suara Merdeka, konflik yang terjadi dalam pembuatan RUU APP ini tentu menjadi pecah pendapat antara kubu yang pro dan kontra. Hal ini menjadikan khasanah tersendiri dalam menyatukan pendapat guna menyelamatkan generasi muda dari kerusakan moral. Hendaknya perbedaan tersebut menjadikan umat Islam khususnya untuk mengambil hikmah dari semua itu. Islam yang berdasarkan pemahaman rahmatal lil alamin sebagai rahmat bagi seluruh alam yang mengajarkan tentang keislaman di muka bumi ini.

Berbagai pemikiran yang diungkapkan oleh kedua belah pihak tentunya mendasarkan atas pemikiran yang mendasar. Di antara kelompok yang menentang RUU APP adalah dari kalangan seniman dan seniwati. Bukan semata-mata beralasan karena RUU itu dianggap bisa menghambat kreativitas seni, tetapi juga karena mereka merasa khawatir jika sumber mata pencahariannya ditutup gara-gara dianggap bertentangan dengan undang-undang.

Kelompok yang setuju menganggap RUU APP sebagai “jalan masuk” ke arah penerapan syariat Islam dalam kehidupan masyarakat. Argumen kelompok yang pro dilandasi oleh logika, bahwa bangsa atau negara ini

tengah berada dalam ancaman budaya globalisasi yang merusak moral generasi muda.

Dari pandangan itu, penulis ingin menemukan konstruksi wartawan secara obyektif dan tanpa prasangka di surat kabar Suara Merdeka. Dalam mengekspos kasus itu secara besar. Setidaknya ada beberapa hal yang ingin ditekankan. Pertama, masyarakat mengetahui berita itu dengan jelas. Masyarakat Islam pada khususnya diharapkan mengetahui konflik yang ada dalam Rancangan Undang-Undang Anti Pornografi dan Pornoaksi, dengan penyampaian berita secara benar, juga tidak merekayasa fakta yang ada di lapangan maka citra Islam kepada khalayak umum akan baik. Kedua, konflik dalam pembentukan RUU APP tidak boleh dibiarkan. Tindakan ini penting, baik dalam bentuk investigasi maupun penyidik agar tidak berkembang isu-isu menyesatkan. Dengan mengumumkan hasil penyelidikan itu, masyarakat akan merasa tentram dan damai.

Apa yang dilakukan oleh Suara Merdeka, pada pemberitaannya menurut saya sebagian besar sudah sesuai dengan kode etik jurnalistik Islam, ini ditandai dengan pemberitaan yang obyektif, bijaksana, tidak memihak atau mencaci maki, sehingga menumbuhkan permusuhan dan kebencian serta prasangka buruk.

Pemberitaan di atas juga di lihat dalam kode jurnalistik Islam, Suara Merdeka sudah memenuhi kode etik Islam di antaranya: Sudah menginformasikan dengan benar tidak memanipulasi fakta, bentuk argumentasi yang jelas dan baik sehingga tulisan berita yang dibuat pun akan

disesuaikan sehingga mudah dibaca dan menghindari prasangka buruk yang bisa menimbulkan fitnah, di sini Suara Merdeka sudah memenuhinya.

Dalam hal ini Suara Merdeka telah mendengar dan membaca tentang kemungkaran. Untuk itu Suara Merdeka merasa mempunyai kewajiban untuk mengubah kemungkaran tersebut.

Dengan usaha apa Suara Merdeka mengubah kemungkaran itu. Tentunya dalam hal ini tidak bisa dilepaskan dari peran dan fungsi Suara Merdeka sebagai media massa. Dengan perangkat tulisan (berita) lah mengimplementasikan peranannya dalam bidang dakwah tersebut.

Suara Merdeka dalam berita-berita tersebut di atas menyarankan kepada warga Indonesia khususnya, Islam pada umumnya untuk mengupayakan Islam antara yang pro atau kontra yang berseteru untuk menyikapi dengan bijaksana setiap perbedaan. Untuk itu Suara Merdeka mengubah kemungkaran itu dengan tulisan.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisa bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan dari pemberitaan Rancangan Undang-Undang Anti Pornografi dan Pornoaksi dalam harian umum Suara Merdeka mulai tanggal 6 Maret hingga 28 April 2006, adalah sebagai berikut:

Analisis Framing adalah suatu analisis yang dipakai untuk mengetahui perspektif atau cara pandang yang digunakan wartawan ketika menyeleksi isu-isu dan menulis berita. Asumsi dasar dari framing adalah perspektif individu wartawan yang selalu menyertakan pengalaman hidup, pengalaman sosial, dan kecenderungan psikologisnya ketika menafsirkan pesan. Dampak dari aktivitas ini adalah terjadinya perbedaan makna berita meskipun fakta atau kejadiannya sama.

Dalam mengkaji isi teks berita di Suara Merdeka penulis menggunakan analisis framing yang dikemukakan oleh Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosichi, yang meliputi unsur-unsur sebagai berikut: struktur sintaksis, struktur skrip, struktur tematik, struktur retorik.

Setelah melakukan analisis berdasarkan pada framing Zhongdang Pan, penulis menemukan bahwa berita yang diklasifikasikan pro ada 17 berita dan kontra ada 7 berita. Kesimpulan tersebut didasarkan pada analisis dimana dari perspektif sintaksis Suara Merdeka cenderung mengemas beritanya secara obyektif. Hal ini didukung dalam setiap pemberitaannya selalu menghadirkan

kutipan sumber untuk mendukung validitas suatu berita. Pandangan tersebut menentukan apakah suatu media mendukung, menentang atau netral terhadap suatu isu, baik yang menyudutkan maupun menguntungkan.

Dalam mengkonstruksi berita tentang RUU APP, Suara Merdeka menerapkan strategi tertentu. Strategi yang cukup menonjol pemfokusan adalah terhadap fakta, pemilihan dalam salah satu bagian pernyataan serta label. Contoh dapat ditemukan sebuah berita yang menyebutkan "Inneke: Banyak Artis Dukung RUU APP" sebagai bentuk dukungan kepada RUU APP. Strategi yang dipakai Suara Merdeka seperti di atas antara berita satu dan lainnya saling mendukung. Semua itu digunakan untuk mendukung gagasannya, disisi lain bisa dimaknai Suara Merdeka tidak mendukung pihak kontra RUU APP, itu dibuktikan judul dan lead yang ditulis seperti "Aktivis Perempuan Tolak RUU APP". Struktur skrip, dalam mengisahkan fakta Suara Merdeka menerapkan unsur 5W+1H. Struktur tematik, Suara Merdeka dalam menulis sebuah fakta ini dapat diamati dari paragraf, posisi, kalimat, hubungan antar kalimat yang menceritakan alur pemberitaan. Strategi lain yang tampak ditekankan adalah penempatan elemen grafis, yaitu foto-foto untuk mendukung gagasannya. Hal ini ditandai dalam setiap pemberitaannya Suara Merdeka selalu mengimbangi berita dengan data-data yang lengkap.

5.2.Saran-Saran

Kepada pembaca khususnya mahasiswa Dakwah untuk melakukan pengkajian terhadap analisis framing terhadap berita. Analisis ini penting untuk mengetahui bagaimana sikap sebuah media dalam memberitakan suatu

fakta. Analisis ini juga dapat mengetahui siapa mendukung siapa, dan siapa saja yang dikucilkan yang biasanya tidak dinyatakan dengan jelas dalam pemberitaan.

Berkaitan dengan teknis penelitian, peneliti mengalami banyak hambatan dalam menyediakan literatur, untuk itu peneliti memberikan saran bagi para peneliti dikemudian hari untuk dapat mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Dengan pengetahuan tersebut diharapkan mampu memanfaatkan dalam berdakwah di jalannya, sebagai implementasi dari keilmuan yang selama ini digeluti

5.3.Penutup

Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat dan ridlo-Nya, memberikan lindungan dan bimbingannya dan memberikan kasih sayang-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam tidak lupa kami haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang menjadi penerang bagi kita semua umatnya dan memberikan teladannya dan kasih sayangnya.

Sebagai manusia biasa yang tak mungkin sempurna, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kesalahan dan kekurangan. Tapi bagi penulis, tulisan ini merupakan tulisan yang sangat berharga.

Hasil penelitian, meskipun penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk menghasilkan yang terbaik, namun harus diakui, bahwa skripsi ini masih banyak kekurangannya, baik itu menyangkut data maupun ketajaman analisis, sumbangan saran dari pihak-pihak yang berkompeten sangat kami harapkan. Terima kasih.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, M. Abdullah, *Falsafah Kalam di Era Post Modernisme*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995)
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian (Suatau Pendekatan Praktek) Edisi revisi V*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002)
- Aziz, Ali M, *Ilmu Dakwah*, (Jakarta: Prenada Media, 2004)
- Azwar, Syaifudin, *Metode Penelitian*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998)
- Beilharz, Peter, *Teori-Teori Sosiologi Obervasi Kritis Terhadap Para Filosof Terkemuka*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005)
- Bungin, Burhan, *Pornomedia: Sosiologi Media, Konstruksi Sosial Teknologi Telematika & Perayaan Seks di Media Massa*, (Jakarta: Prenada Media, 2003)
- Chusmeru, *Komunikasi di Tengah Agenda Reformasi Sosial Politik*, (Bandung: PT. Alumni, 2001)
- Daulay, Hamdan, *Dakwah di Tengah Persoalan Budaya dan Politik*, (Yogyakarta: LESFI, 2001)
- Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Terjemah, 1993)
- Duroto, Totok, *Teknis Mencari dan Menulis Berita*, (Semarang: Dahara Prize, 2003)
- Efendi, Onong Uchayana, *Dinamika Komunikasi Remaja*, (Bandung, Rosda Karya, 1993)
- Eriyanto, *Analisis Framing Konstruksi, Idiologi, dan Politik Media*, (Yogyakarta: LKiS, 2005)
- Flournoy, Don Michael, *Analisis Isi Surat Kabat-Surat Kabar Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1989)
- Hikmat Kusumaningrat dan Kusumaningrat Purnama, *Jurnalistik Teori dan Praktek*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2005)
- <http://jonru.multiply.com/journal/item/207>

- Justisia, *Bola Api Pornografi dan Pornoaksi*, Edisi 29 Th. XIV, (Semarang: Fakultas Syariah IAIN Walisongo, 2006)
- Kusnawan, Aep, et, al, *Komunikasi dan Penyiaran Islam Mengembangkan Tablik Melalui Mimbar, Media Cetak, Radio, Televisi, Film dan Media Digital*, (Bandung: Benang Merah Press, 2004)
- Muhtadi, Saeful, Asep dan Efendi, Ahmad, Agus, *Metode Penelitian Dakwah*. (Bandung: Pustaka Setia, 2003)
- Muis, A. H., *Jurnal Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia Pers Indonesia Era Transisi*, (Bandung: Rosdakarya, 2001)
- Nimmo, Dan, *Komunikasi Politik (Komunikator, Pesan dan Media)*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1993)
- Nugroho, Bimo, *Politik Media Mengemas Berita*, (Jakarta: ISAI, 1999)
- Pimay, Awaludin, *Paradigma Dakwah Humanis Strategi dan Metode Dakwah Prof. KH. Saifuddin Zuhri*, Semarang: Rasail, 2005)
- Purwadarminta, W.J.S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996)
- Rachmadi, F, *Perbandingan Sistem Pers (Analisis Deskriptif Sitem Pers di Berbagai Negara)*, (Jakarta: PT.Gramedia, 1990)
- Raqith, Hamad Hasan, *Meraih Sukses Perjuangan Dai*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2001)
- Romli, Asep Syamsul M, *Jurnalistik Dakwah Visi dan Misi Dakwah Bilqolam*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2003)
- Saifudin, Achmad, “*Pemuatan Artikel Agama Islam Sebagai Upaya Peningkatan Dakwah Melalui Surat Kabar Suara Merdeka (November 2001 - April 2002)*”, (Tidak dipublikasikan. Skripsi, IAIN Walisongo Semarang Fakultas Dakwah, 2003)
- Siregar, Efendi, Amir, *Sebuah Kata Pengantar Masduki, Kebebasan Pers dan Kode Etik Jurnalistik*, (Yogyakarta: UII Press, 2004)
- Sobur, Alex, *Analisis Teks Media, Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotika, dan Analisis Framing* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006)
- Sulthon, Muhammad, *Desain Ilmu Dakwah (Kajian Ontologis, Epistemologis dan Aksiologis)*, (Semarang: Pustaka Pelajar, 2003)

Sumardi, Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada: 2003)

Susmiyati, Sri, “*Pemberitaan Media Massa tentang Invasi Amerika Serikat ke Irak (Analisis Framing Surat Kabar Republika tanggal 20 Maret – 19 April 2003)*”. (Tidak dipublikasikan. Skripsi, IAIN Walisongo Semarang Fakultas Dakwah, 2004)

Syukir, Asmuni, *Dasar-Dasar Strategi Dakwah Islam*, (Surabaya: al-Ikhlash, 1983)

Syukir, Asmuni, *Dasar-dasar Strategi Dakwah Islam*. (Surabaya: Al Ikhlas, 1983)

Wawancara dengan Dadang Ariwibowo, 16 Mei 2008

Wawancara dengan Maratul Nasikhah, 16 Mei 2008

Zaidah, Nur, “*Analisis Framing Terhadap Pemberitaan Muktamar Nahdhatul Ulama Ke-31 di Surat Kabar Suara Merdeka Edisi Nopember - Desember 2004*”, (Tidak dipublikasikan. Skripsi, IAIN Walisongo Semarang Fakultas Dakwah, 2006)

Zuhdi, Najmudin, *Berislam Menuju Keshalehan Individual dan Sosial*, (Surakarta: Mentoring al-Islam UMS, 2004)